

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA

KEY NOTE SPEECH

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA

PADA SEMILOKA

“MENEMUKAN SOLUSI ATAS INDIKASI FAKTOR-
FAKTOR PENGHAMBAT AKSES INFORMASI DAN
PENGETAHUAN DI BIDANG PEMANFAATAN ICT”

Para Nara Sumber;

Para Undangan;

Para Hadirin dan

Para Peserta Semiloka yang berbahagia;

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah mengkaruniakan nikmat dan hidayah kepada kita sekalian dalam jumlah yang tidak terhingga. Siang hari ini, kita bersama dapat berada di Red Top Hotel, Pecenongan dalam keadaan sehat wal afiat, sungguh merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Untuk itu, marilah kita manfaatkan keberadaan dan kesempatan kita siang ini, untuk memberikan kontribusi bagi upaya menemukan penyelesaian salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni 'akses informasi dan pengetahuan'.

Para hadirin dan Peserta Semiloka;

Persoalan akses informasi dan pengetahuan, merupakan amanat bangsa, tercantum dalam UUD 1945 sebagaimana telah mengalami beberapa kali amandemen, seperti tertuang dalam Pasal 28, 28 F mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat dan Pasal 28 C serta Pasal 31 mengenai pendidikan nasional¹. Hal ini juga menjadi kepedulian umat manusia, seperti termaktub dalam Declaration Principles dan Plan of Action - WSIS 2003.

Bahkan, akses informasi dan pengetahuan adalah merupakan hak dasar manusia, karena sejak hari pertama kelahirannya ke dunia, seseorang perlu mendapatkan informasi mengenai diri, kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar agar ia dapat survive dan lebih jauh lagi, sukses dalam menempuh jalan hidupnya.

Akses informasi dan pengetahuan, memang baru naik daun menjadi persoalan yang menuntut perhatian kita semua, sejak forum ditataran dunia hingga kampung dan desa. Kesemua itu dapat mencapai skala massal dan meretas lintas batas wilayah negara, berkat peranan media massa maupun perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (information and communication technology).

Padahal, sejak awal kemerdekaan, dengan komitmen kuat para pendiri bangsa untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**” dan seterusnya². Maka persoalan akses informasi dan

¹ Lembaga Informasi Nasional, Persandingan UUD Negara R.I. tahun 1945, halaman 50, Jakarta, 2002. Bunyi Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

² Lembaga Informasi Nasional, ibid halaman 2.

pengetahuan sudah menjadi bagian dari urat nadi kebutuhan kehidupan bangsa.

Akses informasi dan pengetahuan yang telah menjadi amanat Konstitusi serta merupakan komitmen para pemimpin negara-negara di dunia, ternyata bukan sebuah tugas yang mudah untuk mewujudkan. Sebab masih banyak dijumpai berbagai kendala dilapangan, baik faktor penghambat maupun tantangan yang dihadapi. Persoalan yang munculpun bukan sederhana atau sejenis, melainkan kompleks dan bersifat lintas sektoral, bahkan berkaitan erat dan saling berpengaruh antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ketika berbicara sekitar pemanfaatan teknologi, ICT dan telekomunikasi berbasis satelit, maka persoalan yang muncul bersifat lintas negara. Disini diperlu penyerasian rezim regulasi antar negara yang berdampingan secara geografis, namun berbeda dalam implementasi teknologi maupun kebijakan regulasinya.

Para hadirin dan peserta Semiloka sekalian;

Secara internal, didalam negeri sendiri Indonesiapun masih menghadapi segudang persoalan yang perlu dipetakan dan dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, Semiloka tentang "Menemukan solusi atas indikasi faktor-faktor penghambat terhadap akses informasi dan pengetahuan di bidang pemanfaatan ICT", kali ini diharapkan menjadi salah satu starting point untuk membangun kolaborasi dan jejaring kerja guna menemukan solusi dan kesepakatan bersama.

Kepada para narasumber dan peserta yang telah melapangkan hati untuk meluangkan kesempatan dan meringankan langkah kaki menuju Red Top Hotel, kami harapkan kiranya dapat memberikan kontribusi secara optimal sesuai dengan bidang kerja dan lapangan pengabdian masing-masing, sehingga upaya mewujudkan akses informasi dan pengetahuan secara universal bukan lagi sekedar angan-angan.

Kepada panitia dan pihak manajemen Hotel Red Top, kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan akhirnya marilah dengan mengucapkan “basmallah” — Bismillahirrahmannirahim — Semiloka tentang “Menemukan solusi atas indikasi faktor-faktor penghambat terhadap akses informasi dan pengetahuan di bidang pemanfaatan ICT”, resmi dibuka.

Sekian, terima kasih.

Wass Wr Wb.

Jakarta, 10 Februari 2006.

Dirjen Aplikasi Telematika,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, connected strokes.

Cahyana Ahmadjayadi.

Rekomendasi

Semiloka yang bertemakan “Menemukan Solusi atas Identifikasi faktor-faktor Penghambat “Access to Information and Knowledge” guna Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pemanfaatan ICT” yang diselenggarakan di Red Top Hotel, Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta pada hari Jum’at, tanggal 10 Februari 2006, setelah mendengarkan :

1. Key Note Speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Telematika;
2. Paparan tentang *Copyright and Access to Knowledge In Indonesia* oleh Dr. Sothi Rachagan, Advisor Consumers International Asia Pacific Office;
3. Paparan tentang *Hasil studi banding Implementasi Hak Cipta di Thailand, Malaysia dan Indonesia*, oleh DR. Rajeswari, Ketua Consumers International Asia Pacific Office;
4. Paparan tentang *Menemukan Solusi Atas Indikasi Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Tarif Internet Sebagai Upaya Mewujudkan Akses Informasi Yang Terjangkau Bagi Masyarakat* oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
5. Paparan tentang *Develop Access of Information through CSR* oleh Sonitha Galad Corporate Communications Manager, Hawllet Packard Indonesia;

6. Paparan tentang *Open Source Dan Copy-Left Sebagai Alternatif Solusi Bagi Terwujudnya Akses Informasi Dan Pengetahuan Yang Mudah Dan Terjangkau* oleh Sumitro Roestam, Ketua Masyarakat Telematika (MASTEL);
7. Paparan tentang *Mendekatkan Informasi Kepada Pengguna Sebagai Solusi Untuk Mendukung Terwujudnya Perluasan Akses Pengetahuan* oleh Dra. Jusni Djatin Apt, Ir. Sri Hartinah, Msi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Paparan tentang *Kontribusi Industri Perangkat Lunak Dan Komputer Terhadap Kemudahan Akses Informasi Dan Pengetahuan Bagi Masyarakat*, oleh Djarot Subianto, Ketua ASPILUKI;
9. Paparan tentang *Menyikapi Berbagai Kendala Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Murah Serta Upaya Menemukan Solusi Untuk Mendukung Terwujudnya Perluasan Akses Informasi Dan Pengetahuan*, oleh Robinson Rusdi Sekretariat Umum IKAPI;

Serta hasil rangkuman dialog pada Semiloka dengan moderator DR. Ir. Richard Mengko, Staf Ahli Menteri Ristek bidang Teknologi Informasi, maka dengan ini menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pendidikan universal.** Dengan mencontoh praktek di Thailand, kiranya dapat diterapkan di Indonesia “pendidikan adalah public goods” agar tidak dijadikan lahan untuk

mencari uang. Sedangkan pengaturan kewajiban “depository libraries” diterapkan secara ketat dan diawasi, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan volume koleksi secara signifikan.

2. **Buku bebas pajak.** Pembebasan “*Taxation On Book For Schools*” (sejak SD dan SMP dan SMA), sehingga mendorong terwujudnya buku murah dan tidak menyebabkan timbul korupsi (No problem of corruption). Pengawasan buku diterapkan secara ketat dengan memberikan sertifikasi terhadap buku ajar oleh Pemerintah, c.q. Depdiknas.
3. **Buku Murah.** Penerbitan buku murah kiranya dapat diwujudkan dengan menstandarisasikan aspek spesifikasi penerbitan dan cetakan, meliputi antara lain: kertas tidak mahal, illustration sederhana, mengurangi jumlah warna cetak, menggunakan bahan material kertas yang ‘non bleaching’ dan ‘non acid paper’, serta pemakaian buku minimal 5 tahun maupun pemberian Insentif pembebasan pajak pembelian kertas. *Contoh:* pada Pameran buku di Kairo diperoleh informasi Pengadaan buku dibantu pemerintah jadi bisa murah, sementara bahan Kertas tidak harus yang bagus atau prima. Sementara Konsumen Indonesia dibiasakan kualitas raw material buku yang bagus (luks) sehingga melihat buku tidak pada isinya, tapi penampilannya
4. **Pengadaan Buku.** Penerapan model konsorsium Perpusatakaan untuk melakukan pengadaan buku nasional secara kolektif guna menekan harga, serta

menghubungkan perpustakaan secara elektronika (e-library) diantara 24 perpustakaan universitas guna mengefektifkan fungsi pertukaran koleksi antar perpustakaan. Mendekatkan sumber informasi ke pengguna dan meluaskan akses informasi dan pengetahuan (misalnya digital library)

5. **Philosophy access.** "Access to information and knowledge must be open. Publishers have policies that textbooks must be keep as much down as possible". Sedangkan scheme pengadaan buku teks murah dengan cara guru kelas diwajibkan atau dibuatkan skenario insentif kebijakan agar membuat teks book sendiri-sendiri, jadi tidak perlu impor atau membeli buku dari penerbit asing.
6. **Terjemahan buku.** Lembaga dibawah kewenangan Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk melakukan semua terjemahan teks book untuk kepentingan pengajaran di sekolah, sehingga pencedaran buku dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh para guru.
7. **Bandwidth global.** Pemerintah dalam hal ini Ditjen Postel mendorong dan memfasilitasi tersedianya jaringan "fiber optic submarine overseas crossing" utamanya menuju ke kawasan Pasifik. Sedangkan pembangunan "Core backbone nasional" diprioritaskan untuk memperluas pemerataan Jaringan akses informasi dan pengetahuan ke wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.

8. **Teknologi satelit dan jaringan akses murah serta Local content (web).** Untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi satelit yang bertarif murah, hendaklah dimungkinkan adanya sewa satelit luar negeri atau membuka peluang investasi akses satelite maupun pemanfaatan teknologi maju yang lain. Penyediaan jaringan dari supplier dan investor tergantung demand. Oleh karena itu demand harus diciptakan dan ditingkatkan. Teknologi WIFI dan WiMAX harus ditingkatkan, terutama pilihan alternatif penggunaan teknologi mutakhir, yang lebih efisien dalam rangka perluasan pemerataan akses informasi dan pengetahuan yang terjangkau. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan ICT adalah keseimbangan penyediaan antara Infrastructure practice dan content development.
9. **Agregat Content.** Seperti pengelolaan Carrefour, dimana produk bukan milik carrefour semua tapi merupakan barang-barang konsinyasi pihak ketiga. PT. Telkom yang telah mempunyai jaringan di seluruh Indonesia, hendaklah meng "create agregate content" dan mengajak para pengembang yang lain untuk melakukan joint venture guna mengembangkan berbagai aplikasi konten yang diperlukan masyarakat. Dalam hal pengembangan konten bisa juga menggunakan open source software.
10. **Penggalangan dana dan kemitraan tiga pihak.** Alokasi anggaran yang disediakan Negara untuk kepentingan investasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di bidang

ICT relatif terbatas, sehingga perlu digali sumber dana yang lain. Dengan menggerakkan aktivitas charity untuk kepentingan pengembangan sekolah, melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility dari Multi National Corporation. Langkah serupa dapat digalang diantara perusahaan nasional maupun badan usaha milik negara dan milik daerah serta berbagai komponen masyarakat lainnya. Sementara bentuk mekanisme kerjasama didalam penggalangan dan pemanfaatan dana sosial perusahaan dapat ditempuh melalui kerjasama tripartite “publik – privat dan masyarakat”;

11. **Copy rights dan copy-left.** Selain pemakaian “proprietary software”, maka sebagai alternatif, untuk pengembang gunakan software open source agar sustainable. Kiranya dapat dikembangkan atau dicarikan model bisnis software yang tepat, misalkan software ditaruh di internet untuk kepentingan main game dari internet dan dikenakan pembayaran yang relatif murah. Warnet bisa murah à akses kepada publik. Menggunakan open source: Linux bisa menghemat uang tanpa melangkahi HAKI. Artinya begitu beli satu merek, rubah atau upgrade hanya bisa dikerjakan oleh pembuat/penjual awal.
12. **Pemberdayaan masyarakat.** Para pengelola informasi, hendaklah berperan menjadi fasilitator dan navigator, aktif mengembangkan digitalisasi informasi, bertindak proaktif memasarkan informasi, serta memberikan bimbingan

kepada para pemakai informasi sesuai tingkat keperluan dan kemampuannya. Kerjasama jaringan kelembagaan untuk memanfaatkan informasi secara bersama dan bersifat lintas sektoral/ wilayah.

13. **Diseminasi dan Akses informasi:** Kerjasama untuk mengumpulkan informasi, mengolah dan menyebarluaskan atau diseminasi informasi dengan Membangun basis data secara komprehensif dan terpadu. Mengembangkan Kerjasama instansi terkait dengan pola kerjasama Private, Publik (Pemda dan Pemeritnah Pusat) serta universitas dan kelompok masyarakat madani, tidak hanya terbatas pada kegiatan penggalangan dana, melainkan juga dapat diterapkan diberbagai aktivitas pendidikan yang memiliki kandungan misi dan tanggungjawab sosial;
14. **Dukungan kebijakan publik.** Dalam upaya mengembangkan pemerataan akses infromasi dan pengetahuan, diperlukan Dukungan dana yang memadai serta bersumber dari berbagai institusi atau lembaga, baik domestik maupun internasional yang dikelola secara transparan dan akuntable. Dukungan kebijakan publik yang berpihak kepada perlindungan HAKI, pemajuan kepentingan masyarakat konsumen serta perluasan jangkauan pemerataan akses terutama kekawasan perbatasan, daerah tertinggal dan perdesaan.

Jakarta, 10 Februari 2006.

Tim Perumus.

Session I Pukul : 14.03 WIB. Petugas MC dari YLKI

Laporan Pembukaan	Waktu: 14.05 s/d 14.10	Durasi : 5 menit
Dra Indah Suksmaningsih (YLKI)		
<p>Acara Semiloka ini dilaksanakan untuk mencari solusi dari indikasi atas faktor-faktor penghambat akses informasi dan knowledge bagi pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan ICT, terutama untuk para pelajar sekolah, dasar hingga tingkat atas. Tiga Tujuan yang ingin diwujudkan yakni bagaimana para stakeholders (pengusaha, masyarakat/peminat (kualisi pendidikan), dan pemerintah) dapat mengetahui apa saja hambatan-hambatan untuk mendapat akses untuk informasi serta bagaimana upaya menemukan solusinya dapat ditempuh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi hambatan, diharapkan dengan adanya IT bisa mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Tapi dalam kenyataan diakui ada hambatan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk identifikasi.2. Networking perlu diciptakan untuk menuntaskan permasalahan akses to information and knowledge. Apa saja yang harus diexercise agar hambatan tadi dapat ditanggulangi dan bagaimana mewujudkan cita-cita		

agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber informasi dan pengetahuan dengan ICT.

3. Bagaimana menggagas adanya kajian hukum dan kebijakan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Untuk point ketiga ini, misalkan kita bisa belajar dari Mr. Dr. Sothi Rachagan, dan Mrs. Rajes mengenai penerapan UU Hak Cipta (Copy rights) yang juga, menurut hemat kami dapat merupakan penghalang akses ICT ditengah masyarakat . Untuk dapat men"share" pengalaman dan hasil penelitiannya di 11 negara tentang Copyright Law for the benefit of the consumer and all the people. How we can exercise about the Law and Copyright, and to obtain the benefit of the implementation of ICT technology. Copyright adalah salah satu yang menjadi penghalang untuk akses informasi bagi masyarakat. Kita sudah melihat adanya hambatan. Misalnya kasus-kasus :
 1. Pontianak akses sudah diberikan oleh Pemda dan connecting internet sudah disediakan PT Telkom. Tapi sekarang, kenyataan dilapangan tidak jalan karena biaya akses yang mahal.
 2. SMA 70 serta Mahasiswi di Yogyakarta, mereka tidak mengerti apa copy right itu mana

yang boleh dan yang tidak boleh. Karena tidak mampu, sehingga pembajakan software terjadi, sebagai jalan pintas.

3. Masyarakat ingin mengadu kepada Depkominfo dan Depdiknas tetapi aksesnya susah. Padahal ini hak masyarakat untuk didengarkan keluhan-keluhannya.

Hak-hak masyarakat untuk didengar, mereka ingin agar masalah-masalah ini dapat terjawab melalui semiloka ini. Terima kasih untuk kedatangan bapak-bapak. Sekedar mengingatkan kembali, bahwa dalam UU tentang Perlindungan konsumen tercantum jelas klausula yang menjamin bahwa masyarakat berhak untuk didengar (right to be hear) oleh pengambil keputusan di negara ini. Tapi yang terjadi para petinggi itu sulit sekali untuk hadir di acara seperti ini, padahal kehadiran petinggi sangat diinginkan YLKI, sering sudah diundang tidak hadir (kalau sampai protes dari YLKI disampaikan kepada pers, nanti dikomentari dan diharapkan jangan sampai terjadi).

Keynote speech	Waktu: 14.12 s/d 14.20	Durasi : 8 menit
Drs. Amsal Asagiri , Sesditjen Aptel mewakili Dirjen Aptel		
Sambutan tertulis Dirjen akan kami bacakan. Pembacaan Sambutan tertulis Direktur Jenderal Aplikasi Telematika. Selesai.		
Aang Khumaidi	Do'a	Durasi : 3 menit
Upacara pembukaan selesai		MC

Sesi Pertama	Moderator: Indah Sukmaningsih	
Pembicara I	Waktu :14.30 s/d 15.00	Durasi : 30 menit
Dr. Sothi Rachagan Advisor Consumers International Asia Pacific:		
Concep of copyright of the intelektual property is simply means. I give you a monopoly. You have in method something , britained something, created something, that thing people allow you to have a monopoly . in giving you monopoly people look at this votings of areas, area no. 1		

what kind of work can you protect example the simplifies thing is an idea is not protected you express the idea in a book, expression is protected. You have a buku resep kue, saya tidak bias print/copy buku resep kue tsb, tapi saya tidak bias menahan anda untuk membuat kue sendiri yang enak. Idea can not be protected; it is only the expression of the idea that can be protected.

But importing concep :

1. what I words are eligible from protection of the copy rights not all words are eligible. So when you draft the low don't give more words the necessary. This is all this eligible from the protection you don't have to give more. in the copy right
2. when you see protect what is the meaning of the word protect, protect what, from instants I can protect you from reproducing maybe, but do I protect you from what this your book, I bought this book, can I land it to him, I cant not print this book myself to other people ya this is protected. Can I land her , so you gonna ask what is it is the protector, what is the right to protector, what bundle of rigts granted the protector.
3. how long is the protection, is it. 30 years. How long should I protect you , the Duration of copyright for the protection.

4. eventhough you protection this is a right for the protected, what this is a protected this is a bundle of rights, this the duration, even then the copyright limitations and exceptions .

Studi implementasi Intellectual Property Right pada 11 negara di Asia Pasific. Kita lihat di Indonesia, apakah UU tentang Hak Cipta menghambat akses informasi? Copyright itu memberikan monopoli tapi sejauh mana kita bisa melimitasi aspek monopoli. Dr. Sothy adalah PhD dan Advokat dari Pengadilan Tinggi Malaya, juga Dekan pada MARA. Selama 5 tahun menjabat sebagai Direktur (Consumer international for Regional office of the Asia Pacific – CIROAP). Meninggalkan CIROAP untuk kembali ke akademisi di Malaysia. Jabatan lain adalah Konsultan pada Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian dalam pembentukan UU tentang Perlindungan Konsumen di Malaysia. (ybs pemenang consumer of the year th 1995 sekaligus juga Bapak consumerisme (yg memperjuangkan perlunya orang berhati-hati ketika dia mengkonsumsi baik pembelian maupun publik services) Basic Concep :

1. The study about IPR Ketika involve IPR (intellectual property rights) issue kita lihat different level, international global level. Berne Convention. International Treaties apa yang negara kita menjadikan concern, dan apakah yang dijadikan

pertimbangan. Masalah nya treaties seperti apa yang kita lakukan :Contohnya US negara paling besar.Treaties apa saja, pemerintah punya pilihan untuk meratifikasi. Kecuali misalnya TRIPS yang harus terikat karena WTO. Can we change the treaties seperti yang sudah dikerjakan civil society agar lebih seimbang antara Produsen dan konsumen.

2. Indonesia sebagai salah satu country member dan terikat pada Berne Convention, WIPO Copyright Treaty dan WTO. Indonesia bisa saja tidak jadi anggota. Indonesia adalah satu diantara sedikit negara yang jadi anggota dalam WTO. Kalau anggota, saya harus ratifikasi, put these into my law. In drafting the law, masukkan semua yang kita butuhkan, jangan berlebihan.
3. Identifikasi treaties yang di diberlakukan dinegara-negara Asia Pacific. (What you can do and what you have done on copyrights in terms of knowledge. Copyright is giving monopoly. The idea is not protected, but the expression of these ideas (in the form of print material) are protected by law. Kalau sudah jadi print material, dilarang untuk diperbanyak tetapi tidak dilarang untuk dipinjamkan. Berapa lama dilindungi, dan siapa saja yang mendapatkan perlindungan, ada limitation dan exceptions.

UUHC harus mengupayakan a right balance between private and public interests. Caranya: beri scope seperti yang diperlukan, jangan berlebihan. Gunakan semaksimal mungkin limitation and exceptions. Contohnya, US adalah negara yang paling lama to pass IPR law, karena busy copying dari UK. Balance between copyright (private) interest and public interests: Article 27 Human Rights : being fair between Misalkan 20% untuk buku di UU, kenyataannya Cuma 5-9%. PI: Dijual di malaysia untuk 50USD. indonesia bisa import bisa melihat 3 treaties. Make sure the UUHC membolehkan ini. CL: published in UK, dapat copyrights di UK. UUHC hanya beri CL untuk translataion dan reproduction tapi tidak publication. Anti circumvention: gather dan compile data cuaca lalu publish di newspaper. Data is not protected, the collection of data base is protected. Great monopoly on book publishing di USBuku mungkin lebih murah di Indonesia, tapi % GDP lebih besar (earning capacity Indonesia lemah).

Rekomendasi:

1. Di negeri Thailand pendidikan adalah public goods jadi tidak bisa cari uang di sini.
2. Depository libraries diterapkan secara ketat dan diawasi, sehingga merupakan Good practices applied in Thailand.

3. Tax book for sd dan SMP. No problem of corruption. Government firm controlled buku apa yang boleh didistribute dan diprinted, certified by Depdiknas. Strictly controlled. Publisher harus make sure tidak boleh mahal, less illustration, less color, low material. Must be used at least 5 years. Some schools no charge ke students
4. Consortium thailand library consortitum. Puchase and share the resources. 24 public univ electronically connected. Also on line journals and all produced by university.
5. Philosophy access to K harus open. Publishers have policies bahwa textbooks harus keep as much down as possible. Termasuk komersial
6. Scheme : teachers dipaksa / insentif buat teksbook jadi gak perlu beli buku asing
7. Translation: institutes under Ministry translate semua material untuk teachers. Free of charge.

Pembicara II	Waktu :15.02 s/d 15.07	Durasi : 5 menit
--------------	------------------------	------------------

Mrs. Rajeswari : Direktur Consumers International

1. Banyak pengalaman dari Thailand yang dapat dipetik, jika di Indonesia saat ini ingin menerapkan ketentuan tentang hak cipta. Di Thailand harus ada sertifikat untuk mencopy sesuatu buku; apapun jenis dan judul buku, begitu juga kalau beli buku menerima receipt.
2. Mereka sangat ketat dalam mengawasi semua yang bentuknya copyright (hakcipta) Namun jika mau print dari Internet, itu bukan dari edisi yang diterbitkan di umum.
3. Perpustakaan universitas di Thailand semua terhubung/ terkoneksi dengan informasi mengenai pencarian e-resources. Jika student ingin memasukan tulisannya bisa me-link langsung.
4. Di Thailand ada informasi semua filosofi, prices, buku wajib (textbook). Penulisan mereka tidak pakai references dari buku, karena harus ada pembayaran yang sangat mahal untuk melakukan pencantuman references dari orang tersebut.

Sesi Kedua	Pukul:15.50-16.15 WIB	
Moderator Dr. Ir. Richard Mengko Staf Ahli Menristek		
<p>Panelis Sesi kedua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bpk. Budi Santoso, Dir Telekomunikasi, Direktur Jendral Postel, Depkominfo 2. Ibu Sonitha Galad, Corporate Communication Manager, PT. Hewlet Packard Indonesia 3. Bpk. Djarot Subiontoro ASPILUKI (Assosiasi Pengusaha Perangkat Lunak Komputer) 		

Pembicara I	Waktu:15.09 s/d 15.29	Durasi : 20 menit
Budi Santoso , Direktur Telekomunikasi, Dirjen Postel, Depkominfo		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Tarif internet untuk mewujudkan penyediaan akses masyarakat dan perlakuan yang adil terhadap operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun demikian, untuk mewujudkan akses yang merata, ada mata rantai panjang: 1-2-3-4. plus hard ware. Plus pembelajaran 		

2. Paparan: faktor Supply chain berpengaruh pada tarif penggunaan internet oleh pelanggan. Keterbatasan global bandwidth: jaringan terbatas dan mahal (sewa-sewa jaringan optik ke LN, satelit).
3. Satelit nasional berbasis IT belum tersedia dan ada kendala geografis, Keterbatasan Backbone: jaringan core backbone nasional minim dan sewa jaringan masih mahal
4. Kurang jaringan akses (last miles): jaringan akses berkapasitas besar masih terbatas dan mahalnya jaringan akses.
5. local content (web) masih minim: persoalan availability à terhadap akses seperti problem "chicken or egg"

SOLUSI:

1. Bandwidth global. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya jaringan submarine overseas crossing utamanya menuju ke kawasan pasifik. Ada tawaran bandwidth murah dari Thailand.
2. Core backbone nasional Jaringan akses.
3. Teknologi satelit murah
4. Local content (web).

Catatan penutup:

Pemerintah tidak lagi berwenang menetapkan tarif sebagaimana diatur dalam UU tentang telekomunikasi (UU RI No 36 tahun 1999). Kebijakan Duopoly akan segera diakhiri pada tahun 2006, dengan tujuan agar kompetisi diantara para pengelola lebih fair. Untuk mendorong penurunan tarif perlu kompetisi. Penyediaan jaringan dari supplier dan investor tergantung demand. Demand harus ditingkatkan. Teknologi WIFI dan Wimax harus ditingkatkan, terutama Penggunaan teknologi mutakhir, yang lebih efisien.

Pembicara II	Waktu: 15.30 s/d 15.44	Durasi : 14 menit
Ibu Sonitha Galad , Corporate Communication Manager, PT. Hawllet Packard Indonesia		
1. Corporate Social Responsibility (CSR). Visi-visi kami kedepan kira-kira sebaiknya apa yang dilakukan untuk pendidikan di Indonesia, sebagai perusahaan kami harus punya komitmen bisnis bagaimana untuk melakukan sustainable economic development. Hewlet package harus takecare dalam masalah COR bisnis itu sendiri. Yang harus dilaksanakan adalah standar of bisnis conduct harus		

dilakukan dengan baik. Seperti copyright conduct. Seluruh pegawai harus melakukannya. Kita juga melakukan social investment, dan policy matching bersama pemerintah (publik private partneship)

- .2. HP ada policy tersendiri, seperti donation ke masyarakat (CSR) tidak akan dipublikasikan. Yang jadi masalah adalah affordability. Yang sering terjadi di Indonesia hanya mementingkan gengsi, seperti handphone atau notebook, yang dibeli adalah yang terbagus dan termahal. Padahal Pemakaian hanya untuk word atau hp hanya untuk keren.
3. Kalau dari segi populasi Indonesia menempati ranking No. 4, kepemilikan radio dan tv, telepon subscriber grafiknya tinggi, tapi untuk kepemilikan PC dan minat baca newspaper, minat ICT jauh dibawah negara lain. Develop access of information through CSR, ini hanya salah satu cara.
4. Tujuan CSR: Sustainianble economic development. Standard business harus baik. untuk setiap orang dalam company. Take care business, keluarganya, juga social investment.
5. Public-private partneship. ***CSR Hewled Packard tidak dipublikasikan (policy)***

6. Access to information, is it a matter of affordability?
Tidak, Nokia pembeli nomor 1 adalah Indonesia.
Behaviour orang indonesia; selalu ingin features terbaik, tetapi pemakaian minim.
7. Daily newspaper india 2 kali indonesia. Internet price per 20 hours per months. Ind 22, india 9. ICT exp per GDP 343,7
8. Tujuan punya ICT: SDM berkualitas, productivity: efisiensi à economic growth shg competitiveness. Indonesia 59 dari 60.
9. Bagaimana bridging digital literacy, technical skill, Change paradigm: Dari own à use. You pay what you use not what you own.
10. Gunung Kidul: komputer lab untuk sekolah di pagi hari, siang untuk publik. CSR dengan Microsoft. Masalahnya hanya : How to innovate?
11. Funding: 1. self funding, alumni contribution, philanthropy. Social investment in HP education, e-inclusion dan e-community. SD ngajarin gurunya. SMP dan SMA bisa bikin lisence
12. Universitas : untuk research university yang butuh high tech. Brazil: 55 jt orang diberi lisence. Dallas Independednt School District 16000 PC.

13. BCA kontrak 3 tahun, pada akhir tahun boleh dilanjutkan, boleh dibeli sendiri dengan harga ekonominya. **Konklusi:** Yang penting dalam pemanfaatan ict adalah keseimbangan penyediaan antara Infrastructure practice dan content development.

Konklusi:

Yang penting dalam pemanfaatan ict adalah keseimbangan penyediaan antara Infrastructure practice dan content development.

Pembicara III	Waktu : 15.46 s/d 15.50	Durasi : 4 menit
---------------	-------------------------	------------------

Bpk. Djarot Subiontoro ASPILUKI (Assosiasi Pengusaha Perangkat Lunak Komp Indonesia)

1. Bisnis ICT 2005 1,9 milliard dolar. 12 % services ICT. Investasi Indonesia belum optimal. Terlalu banyak inefisiensi à harga mahal. Dibandingkan dengan India dan USA, indonesia harusnya 3 miliar dolar. Penggunaan ICT belum luas dan belum dalam.
2. Software mahal. Produsen harus juga untung, kemahlaan karena kompensasi bajakan. Banyak komersial karena prospektif income. Pengembang didanai USAID menjual software perpustakaan,

admisitrasi sederhana di Bali. Sustainability tidak ada setelah dana habis.

Solusi

1. Copy rights dan copy-left. Dipakai untuk pengembang software agar sustain.
2. Cari bisnis software yang tepat. Software di taruh di internet main game dari internet dan bayar.

Usulan

1. Agregat konten. Seperti carrefour. Produknya bukan milik carrefour semua tapi konsinyasi.
2. PT. Telkom punya jaringan di seluruh Indonesia, create agregat konten dan mengajak para pengembang yang mau joint.
3. Dalam pengembangan konten bisa juga menggunakan open source software

Sesi Ketiga	Waktu : 16.15 – 17.30	
Moderator Dr. Ir. Richard Mengko Staf Ahli Menristek		
<ol style="list-style-type: none">1. Bpk. Robinson Rusdi Sekretariat Umum IKAPI2. Bpk. Sumitro Rustam Ketua Mastel (Masyarakat Telekomunikasi)3. Ibu Dra. Jusni Djatin, Dpt Pusat Dokumentasi Ilmiah LIPI		

Pembicara I	Waktu : 15.55 s/d 16.12	Durasi : 17 menit
Bpk. Robinson Rusdi Sekretariat Umum IKAPI		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari jumlah 685 penerbit, 70% berada di pulau jawa. 25% di Sumatera, sisanya di luar kedua pulau itu. Dengan IT mungkin proses pemerataan usaha lebih cepat. 2. Fokus: pengadaan buku murah untuk mendukung perluasan akses informasi ke daerah-daerah. Buku pelajaran SD, SMP dan SMA. Proses naskah dari pengarang dengan dasar kurikulum pemerintah (UU Sisdiknas), ada BSNP badan nasional standardisasi kurikulum pendidikan. 3. Berdasarkan kurikulum itu dibuat buku. Selanjutnya oleh pemerintah di lihat apakah sudah layak buku tersebut di sebarluaskan. Kurikulum -> naskah -> edit -> cetak -> 4. Ada sistem penilaian untuk menilai mutu kelayakan buku. Hasilnya disebarluaskan di seluruh indonesia. 5. Peraturan pemerintah ttg buku pelajaran: Permendiknas No. 11/2005 : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Buku pelajaran 5 tahun ❖ Harus lulus penilaian BSNP dan dipublikasikan 		

- ❖ Guru dilarang menjual buku ke siswa, jadi lewat toko buku
- ❖ Label harga pada buku

6. Kendala: Toko buku terbatas jumlahnya, terutama di tingkat kecamatan. Publikasi BSNP tidak sampai, sehingga penerbit terus berdatangan ke sekolah untuk lobby.
7. Komponen harga Cetak 35% (kertas tinta). Penerbit 65% (edit 15, royalti 10, marketing overhead, 30, margin 10). IPR / editor tidak dihitung oleh Diknas. Tapi sangat penting buat penerbit.
8. Adaperbedaan perhitungan Harga buku. Versi Pusat perbukuan nasional rasio antara Cetak penerbit= 60 / 40

Ketentuan buku :

- Standard harus hvs 70 gram
 - Rabat 35%
 - Murid harus ongkos transport ke toko buku.
 - Pajak 25%
9. Sehingga kendala buku murah dari Permendiknas. Raw material standar tinggi (HVS 70). Rabat perjalanan tinggi. Murid harus ongkos

transport ke toko buku. Orang tua bolos kantor (biaya sosial) Kurangnya peran pemerintah untuk menghilangkan pajak.

10. Kelompok Ibu Menteri mengelola mobil pintar. Ternyata ada komponen ada tax 25%, jadi komitmen pemerintah tidak kelihatan. Tax itu muncul dari 10% cetak dan raw material, royalty 10%. PPN dibebaskan hanya untuk konsumen.

Solusi:

- Alokasi anggaran. Menggerakkan CSR dari MNC. Penerbit diijinkan kertas HVS à koran, jumlah warna dikurangi, ketebalan buku dikurangi, jual ke koperasi.
- Insentif pajak pembelian kertas. Contoh kasus negara lain : Pameran buku di Kairo Pengadaan buku dibantu pemerintah jadi bisa murah. Kertas tidak bagus. Konsumen Indonesia dibiasakan kualitas raw material buku yang bagus (lux) sehingga melihat buku tidak pada isinya, tapi penampilannya.

Pembicara II	Waktu :16.13 s/d 16.30	Durasi : 17 menit
Bpk. Sumitro Rustam Ketua Mastel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Opensource and copy left untuk akses to knowledge. Banyak alternatif untuk mendapat akses informasi. Ada 12 cara. Open source – free software. Open source bukan public domein, ada liscence dan restriksi. Ide copy right tidak boleh didistribusi, open source boleh didistribusi tapi gratis. Dalam distribusi ada conditions: harus gratis, author harus di acknowledged. 2. Pengembangan open source: website dan individuals. Free Software Foundation. Beda dengan open source. FSF berkiatan dengan isu sosial, etika. Free – Freedom bukan gratis. 3. Malaysia memanfaatkan FSF dan Opensource. Di Indonesia namanya IGOS (Indonesia goes to opensource). Propietary Operating System vs Open source menghemat ribu triliunan rupiah. Juga ada condititons yang kebalikan dengan POS yaitu harus mendistirbusi dan harus gratis. 4. Warnet bisa murah à akses kepada publik. Contoh open source: Linux bisa menghemat uang tanpa 		

melangkahi HAKI. Dengan Linux juga bisa berbisnis: training, copy software, buku majalah, solusi linux.

5. Argumen untuk YLKI untuk mendukung Opensource. Bebas dari risiko closed source, bisa dikopi. Artinya begitu beli satu merek, rubah atau upgrade hanya bisa dikerjakan oleh pembuat/ penjual awal.

Pembicara III	Waktu : 16.32 s/d 16.50	Durasi : 18 menit
---------------	-------------------------	-------------------

Ibu Dra. Jusni Djatin, Dpt Pusat Dokumentasi I.lmiah **LIPi**

1. Masalah. Tidak semua informasi bisa dimanfaatkan, harus dikemas kembali. Jaringan informasi tidak tertata Pola penyebaran informasi terpusat di lembaga tertentu: menciptakan sendiri tidak mau bergabung. Pengguna harus pergi ke banyak tempat untuk mengumpukan info. Jarak antar sumber informasi.
2. Pendanaan: terbatas sehingga koleksi, SDM, fasilitas

Solusi

- Mendekatkan informasi ke pengguna dan meluaskan akses (contoh digital library)
- Dana, resource sharing
- Pengelola informasi, harus menjadi fasilitator dan navigator, digitasi informasi, proaktif memasarkan informasi, bimbingan kepada pemakai info
- Kerjasama jaringan untuk memanfaatkan info bersama
- PDII 40 tahun lalu Koleksi Kerjasama untuk mengumpulkan informasi Membangun basis data
- Diseminasi dan Akses informasi: masih memanfaatkan free on line journal Pendidikan melek Informasi. Masih mencoba mendapatkan koleksi dari sumbernya.
- Memperkuat upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan menciptakan yang baru
- Kerjasama instansi terkait: Private, pemda, univ dll.
- Dukungan dana
- Dukungan kebijakan

Pengamatan moderator: DR Ir. Richared Mengko, MSc.
(Resume akhir)

1. Sepertinya masalah akses infroamsid an pengetahuan adalah kompleks, susah, dan tak ketahuan dimana ujungnya. Padahal, di Negara tetangga (Malaysia) bisa segera mendapatkan solusi dengan cepat.
2. Malaysia lebih efesien (contoh kecil materi presentasinya). Oleh karena itu, solusi bersama hendaklah yang applicable dan realistik.

Sesi Tanya - Jawab

Pertanyaan 1	Waktu : 16.52
Nama	Ibu Indah
Dari	Y L K I
Isi Pertanyaan	1. Untuk pak Budi Santoso. Ada hambatan dan solusi. Ada persoalan besar di tingkat implementasi solusi. Apa copy right atau investor atau konsumen (Demand)

	<p>2. Untuk Bu Ana apa memang konsumennya gak butuh?</p> <p>3. Untuk Pak Robinson Kalau dicetak 5 tahun sekali, akan jadi ketinggalan. Konteksnya apa. Apa ada komintmen IKAPI untuk buku murah? Apa hambatannya? Bagaimana menggunakan LSM untuk menciptakan buku murah kalau halangannya adalah birokrasi</p> <p>4. Untuk pak Soemitro Roestam. Apa hambatan IGOS?</p>
--	--

Pertanyaan 2	Waktu : 16.55
Nama	Trigangga
Dari	Museum Nasional
Isi Pertanyaan	<p>1. Untuk Pak Soemitro. Apa penyebabnya masyarakat kurang menerima opensource selain familiarity? Selama ini dimanjakan kemudahan dari closed source, gak perlu menuliskan baris perintah seperti kembali ke jaman DOS.</p>

	<p>2. SDM untuk Komentar: rekomendasi Dr. Sothi Rachagan perlunya kebijakan nasional. Untuk Indonesia, sebetulnya sudah ada atau belum? Instansi mana yang leading?</p> <p>3. Untuk IKAPI: Permendiknas bukan memenangkan publik karena hanya menggeser pengadaan buku ke pasar (dari sekolah ke toko buku). Bagaimana dengan Ide buku generik?</p>
--	---

Pertanyaan 3	Waktu : 16.57
Nama	Bpk. Soedariatmo
Dari	YLKI
Isi Pertanyaan	<p>1. Dr. Sothy merekomendasikan perlunya Nasional Policy dalam konteks access to knowledge,</p> <p>2. Apa sudah ada policynya, mana yang leadernya (institusinya)</p> <p>.3. Siapa yang leader mengorganisir untuk pelaku usaha.</p>

Pertanyaan 4	Waktu : 16.59
Nama	Muhir Subagia
Dari	Pengurus Besar PGRI
Isi Pertanyaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk IKAPI. Banyak penerbit ke sekolah, perang diskon. Apa ada kode etik dari IKAPI? 2. Untuk YLKI. Agar dapat diadakan Lokakarya untuk listrik dan BBM karena 1,6 juta konsumen adalah anggota PGRI. FYI: PGRI dan ISPI sedang menggugat MI, anggaran pendidikan 8%. Wajib belajar 9 tahun masih beban.

Jawaban Nara sumber

Jawab	Waktu : 17.03 – 17.30
Pertanyaan	
Isi Jawaban	<p>Budi Santoso,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi: harapannya setelah duopoli terminasi, maka kompetisi pasar dapat berperan didalam upaya menurunkan tarif sesuai kemampuan konsumen. 2. Birokrasi: tender 3G tranparan. Bila murah, pasti demand banyak.

Sonitha Galad

1. Awareness harus dibangkitkan, karena jelas menjanjikan banyak hal, terutama world competitiveness. Cara: government involvement, business, infrastructure, content
2. Hambatannya: sudah ada sambutan baik dari pemerintah, konsumennya yang belum.

Robinson

1. Ada mata pelajaran tertentu yang perlu di update, jadi bisa dengan suplement.
2. Buku murah, harus kebijakan pemerintah, misalnya Permendiknas. HVS harus kuat untuk 5 tahun.
3. Presiden Megawati sudah instruksi ke Menperindag untuk cari raw material murah, tapi gak lanjut.
4. IKAPI tidak hanya mikir bisnis. IKAPI sering dikambinghitamkan oleh LSM dan konsumen serta depdiknas sebagai penyebab buku mahal.
5. Pemerintah tidak bantu distribusi, misalnya pos untuk barang cetakan.

akibatnya di Papua harga 2 kali. Cetak jarak jauh urusannya dengan hak cipta dan belum tentu jadi murah juga karena gak skala ekonomi.

6. Mendiknas sekarang ekonom, bukan pendidik.
7. UUD jelas, tapi gak ada dana dan good will. Gonta ganti kebijakan.
8. Buku generik bagus. Otonomi lebih dimungkinkan, terutama kabupaten kaya.
9. BSNP akan mengeluarkan kurikulum baru 2006, kemungkinan buku juga berubah. Gonta ganti buku salah satunya keinginan guru, guru kurang kreatif.
10. Penting: meningkatkan minat baca, sehingga perpustakaan berkembang.

Pak Roestam

1. Banyak kelebihan Linux. Kurang pemasaran dan dukungan pemerintah. Anggaran promosi (sponsor) terbatas. Misalnya kuis IGOS.

2. Opencourse ware: open source untuk content milik MIT.
3. Distant learning sudah diakui Depdiknas. Kelas jarak jauh dilarang. Ini kesempatan bikin kursus jarak jauh.

Jusni

1. Sejak 1973 dengan dukungan program dari Bappenas, telah menerapkan ketentuan agar seluruh karangan ilmiah harus diserahkan ke Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia.
2. Kewajiban penyerahan ke PDII hanya sampai abstract-nya. Kalau dokumentasi tidak diselenggarakan dengan baik, maka bisa membuka peluang terjadinya plagiat dan pengulangan.
3. Tidak banyak tulisan orang Indonesia yang disitir orang lain.

Robert

1. Kendala IGOSTidak ada help desk yang profesional. Ristek mau inisiatif membantu ini.

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="414 159 952 383">2. pernah eksperimen, seminar dengan 10 menteri asean. Di Luar negeri Jalan tapi di Indonesia hanya semangat pada saat ini saja, sampai di tanah air tidak ada actionnya.<li data-bbox="414 414 952 542">3. Tentang bisnis gratis. Yahoo dan Google bisnis gratis, tapi dia yang kaya. Kita kurang pintar untuk bertindak seperti itu
--	--

La voix des Consommateurs
à travers le monde

The global voice
for consumers

La voz global para la defensa
de los consumidores



Copyright and Access to Knowledge
In Indonesia

Dr. Sothi Rachagan
Advisor
Consumers International
Asia Pacific Office

Copyright and Access to Knowledge

Copyright is a monopoly right given to the owner over certain works such as books, paintings, movies, songs, photographs, computer software, etc.

This monopoly right is limited by law in 4 ways:

1. The type of works eligible
2. The bundle of rights granted
3. The duration of copyright protection
4. The limitations and exceptions

International Copyright Treaties

National copyright laws are framed according to the international treaties the country has signed:

- Berne Convention 1886
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994
- WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996

Indonesia is bound by all 3 treaties. Law of Republic of Indonesia No. 19 Year 2002 Regarding Copyright entered into force on 29 July 2003.

Balance in Copyright Law

Balance between rights of copyright owners and public right to access can be achieved in national copyright law by providing the minimum required by international treaties:

1. Not expanding the scope of copyright
2. Using all available limitations & exceptions

Balance in Copyright Law

1. Scope of copyright:

- Protect only works required to be protected
- Confer only rights required to be conferred
- Keep duration of copyright protection to minimum

Balance in Copyright Law

2. Limitations and Exceptions:

- Allow parallel import
- Use compulsory licensing for translation, reproduction and publication
- Copyrighted work must be fixed in material form
- Protect expression of ideas, not the idea itself
- Provide for anti-competitive practices
- Anti-circumvention provision should be linked to infringement
- Teaching exceptions -allow use of the whole work, do not limit types and forms of utilisation, include distance education, do not restrict number of copies for illustration for teaching

Balance in Copyright Law

2. Limitations and Exceptions:

- Quotations exception - do not restrict the way quotations can be made, do not limit the type of works that can be quoted, do not require work to be published before it can be quoted, do not limit length of quotation.
- Exclude official texts, political speeches, speeches delivered in legal proceedings and translations
- Do not extend protection to data in compilations of data
- Allow broadcasting of copyrighted works
- Allow exceptions for public performances, broadcasting, recitation, recording and cinematographic works for religious ceremonies, military bands, festivals and for education.

The Balance Has Tilted

Progressive expansion of scope of exclusive rights in international treaties:

- Copyright owners traditionally had right to control reproduction. Now extended to right to control commercial rental and right to control communication to the public.
- Right to control commercial rental not in Berne. Introduced in TRIPS for computer programs and cinematographic works.
- Communication to the public in Berne, only with respect to public performance, broadcasting and cabling. But WCT provided this as exclusive right, thereby expanding scope of copyright to include any type of "broadcasting" of copyrighted works i.e.including internet.

The Balance Has Tilted

Expansion of duration for protection:

- Increased by at least 400% since England's Statute of Anne, (1709) and the US Copyright Act (1790) - which provided for 14 years, with extension for further 14 years.
- Berne Convention initially started with life of author plus 7 years. In 1908, extended to life of author plus 50 years. TRIPS and WCT provide the same.
- US and EU have extended in national laws to life of author plus 70 years. Being extended to the rest of the world through bilateral trade agreements e.g. US-Thai FTA.

The Balance Has Tilted

Expansion of exceptions and limitations:

Berne introduced the “three step” test for exceptions and limitations to:

- special cases
- no conflict with normal exploitation of work
- does not unreasonably prejudice legitimate interests of author;
and the use of protected works for teaching, provided compatible with “fair practice”.

In Berne this test was only for reproduction rights. TRIPS expanded it to all economic rights of copyright owners.

Limitations and Exceptions

Parallel Importing:

Not prohibited in Berne and TRIPS. Developing countries can take advantage and parallel import cheaper books from other countries. This is only possible if copyright law restricts right of distribution of copyright owner to “first distribution of copies not previously circulated in other countries”.

Australia’s copyright law allows parallel imports of electronic books, computer software and computer games. Singapore also provides for parallel imports of copyrighted material.

Indonesia does not provide for parallel import.

Limitations and Exceptions

Compulsory licensing:

Berne and TRIPS expressly provide for compulsory licensing for:

- translations for the purpose of teaching, scholarship or research
- reproduction for use in teaching

Indonesia's copyright law provides for compulsory licensing for translation and reproduction for education, science, research and development but not for publication of these works. Students and lecturers badly need translated books in universities in Indonesia.

Access to Knowledge in Indonesia

Copyright law in Indonesia provides the following:

1. Article 15a - allows use of work for education, research, scientific thesis, report writing and criticising or reviewing so long as sources cited and does not prejudice interest of author
2. Article 15c - allows lecturers to excerpt a work in whole or in part for the purpose of education and science
3. Article 15d - allows non-commercial reproduction of scientific, artistic and literary work in Braille for the blind
4. Article 15e- allows limited reproduction of work other than computer program by public library, scientific or educational institution for their activities

Access to Knowledge in Indonesia

Copyright law in Indonesia provides the following:

5. Article 16 - government can grant compulsory licence for translation of foreign language books or reproduction of books without permission of copyright owner under certain conditions.

So far no such licence has been granted in Indonesia.

Though many limitations and exceptions already exist in Indonesia's copyright law, they are not being used by the government, public and educational institutions. Public awareness extremely low.

Limitations and Exceptions

Apart from parallel import and compulsory licensing, Indonesia can expand further access to knowledge through reforms to its copyright law:

- Expand limitations and exceptions to include all educational activities such as libraries, handicapped community, distance education.
- Allow teachers and educational institutions to make as many copies of teaching materials as necessary.
- Allow free use of copyrights works in educational broadcasts.
- Provide reservation of performing, recitation, broadcasting, recording and cinematographic rights of copyright owners for educational purposes.

Cost of Educational Materials

Book Publishing:

Dominated by developed countries - The US (20%), UK (17%), Germany (10%), Spain (6%), France (6%) and Italy (6%) between them produced nearly two-thirds of global exports of books in 1998.

The US and UK have carved out the world English language book market. After World War Two, New York and London publishers came to an agreement not to compete on each other's turf. London book publishers therefore dominated the book markets of the Empire and thereafter the Commonwealth, while the US sells books to its colonies.

Cost of Educational Materials

Book publishers and importers/exporters operate cartels in determining book prices for their markets. This is condoned by governments.

In Malaysia, the Malaysian Book Importers and Exporters Association fixes prices of books in consultation with the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs and Ministry of International Trade and Industry every three months. The prices of imported books in Malaysia are dependent on the average exchange rate of major currencies and a 30% mark-up for costs.

Governments need to protect consumers from such unfair pricing mechanisms.

Cost of Educational Materials

Governments also need to look into the practice of banning books from certain countries from entering their markets.

For example books translated into Malay by Malaysian publishers are not allowed to be sold in Brunei and Indonesia. This practice of governments protecting their borders poses a hindrance to the public having access to knowledge from other countries.

Cost of Educational Materials

CI's Comparative Survey of Book Prices

Surveyed prices of educational books in Indonesia, Thailand, US. Retail cost of Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics:

Indonesia - US\$ 81.70

Thailand - US\$ 65.23

US - US\$ 139.00

However, in terms of cost (% of GDP per capita) and price in the US (GDP equivalent)

Indonesia - 8.43%: US - US\$ 3,170.97

Thailand - 2.83% : US - US\$ 1,065.41

Cost of Educational Materials

The pricing mechanism is quite unrealistic of the paying power of consumers in the different countries and in actual fact consumers in developing countries are at a considerable disadvantage.

Developing countries cannot continue to ignore the pricing mechanism and leave it to market forces to decide retail prices especially for educational material.

Alternatives for Indonesia

Indonesia should expand access to knowledge by:

- Making access to information and knowledge a national policy
- Fighting corruption in education sector.
- Expanding depository libraries
- Forming consortium of libraries purchasing collectively and sharing resources

Alternatives for Indonesia

- Encouraging public to access open archives/free journals
- Promoting open source software
- Regulating book pricing by publishers and retailers
- Reviewing government policies on taxes for production and importation of educational materials
- Punishing anti-competitive practices of book distributors, publishers, retailers

Menemukan Solusi atas Indikasi Faktor Penghambat dalam Kebijakan Tarif Internet Sebagai Upaya mewujudkan Akses Informasi yang Terjangkau bagi Masyarakat

Disampaikan dalam Semiloka :
Menemukan Solusi atas Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat
"Access to Information and Knowledge" Guna Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Pemanfaatan ICT

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Departemen Komunikasi dan Informatika



Agenda

- Pengantar
- Faktor Penghambat
- Solusi
- Penutup





Pengantar

- Internet memiliki manfaat meningkatkan kapasitas kemampuan manusia, ekonomi, dan kultur.
- Untuk menyediakan layanan akses internet kepada masyarakat diperlukan mata rantai (supply chain) berupa, yaitu penyediaan PoP/Hub di luar negeri, jaringan transmisi dari dan ke luar negeri, jaringan backbone domestik, jaringan akses pelanggan.
- Disamping mata rantai jaringan tersebut, juga diperlukan fasilitas-fasilitas lain berupa perangkat keras dan lunak di sini pengguna.
- Akses dan penggunaan internet juga memerlukan pembelajaran dan pembudayaan serta adanya kebutuhan akan akses informasi.
- Pemaparan ini mengupas hambatan-hambatan dari sisi jaringan supply chain yang sangat berpengaruh kepada tarif penggunaan internet oleh pelanggan akses internet.



Faktor Penghambat

Keterbatasan Global Bandwidth



- Jaringan overseas cross-submarine FO masih terbatas :
 - Saat ini hanya FO Jakarta-Singapura yang dimiliki Indosat
 - Beberapa pembangunan telah selesai oleh operator telekomunikasi lainnya, namun belum dapat beroperasi maksimal dan belum terhubung dengan baik ke jaringan domestik.
 - Beberapa operator berminat membangun submarine-cable namun masih dalam tahap perencanaan.
 - Indonesia belum terhubung langsung ke penyedia Tier1 internet global.
- Mahal dengan indikasi
 - Biaya sewa jaringan optik ke luar negeri → sangat mahal
 - Biaya transponder satelit baik asing maupun dalam negeri masih dirasa mahal.
 - Belum tersedianya transponder (satelit) nasional yang secara khusus digunakan untuk koneksi berbasis IP yang secara teknologi relatif murah dari sisi pengguna. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki kendala attenuasi yang besar.

Keterbatasan Backbone



- Jaringan Core Backbone (FO) nasional sangat minim :
 - Menghambat distribusi akses
 - Pembangunan yang ada masih terpusat di kota-kota besar dan lebih digunakan sebagai distribusi point bukan jaringan akses ke pengguna kebanyakan.
 - Jaringan akses Fo atau HFC masih terbatas di jalur-jalur tertentu di kota metropolitan.
- Sewa jaringan masih mahal
 - Sewa jaringan-sewa oleh penyelenggara akses internet masih mahal
 - Biaya transponder satelit baik asing maupun dalam negeri masih dirasa mahal.

Kurangnya jaringan akses (last miles)



- Jaringan Akses berkapasitas besar masih terbatas :
 - Jaringan akses FO atau HFC masih terbatas di jalur-jalur tertentu di kota metropolitan.
 - FO lebih digunakan untuk keperluan operator telekomunikasi dalam menghubungkan antar perangkat mereka yang tersebar.
- Mahalnya jaringan akses :
 - Sebagian besar masyarakat masih merasakan mahalnya jaringan akses untuk koneksi internet.
 - Akses dial-up masih dibebani dua biaya : pulsa (waktu per menit) dan ISP (byte per second)

Local content (web) masih minim



- Masih minimnya ketersediaan local content (web) :
 - Merupakan problem “chicken or egg” antara pengguna dan upaya menyediakan local content
 - Sebagian besar content di luar negeri, sehingga kebutuhan bandwidth global jadi besar
 - Banyaknya content yang ditawarkan dan dapat diakses harusnya mendorong masyarakat untuk berinternet.



Solusi

Solusi terhadap hambatan (1)



- **Bandwidth Global :**
 - Mendorong dan memfasilitasi tersedianya jaringan submarine overseas crossing, utamanya menuju ke kawasan pacifik.
 - Usaha untuk mendorong biaya bandwidth global semakin murah telah dilaksanakan dan secara terus menerus diupayakan untuk semakin murah.
 - Mengingat jaringan core network nasional juga terbatas, maka solusi menggunakan satelit asing juga dimungkinkan.
 - Oleh karena itu perlu wadah pengaturan penggunaan satelit asing karena saat ini banyak satelit asing yang menawarkan solusi berbagai teknologi untuk koneksi ke PoP di luar negeri.
 - Mengusahakan teknologi satelit yang murah dari sisi pengguna untuk penyediaan bandwidth global dan distribusi akses internet nasional
- **Core Backbone Nasional**
 - Mendorong dan memfasilitasi dibangunnya core backbone nasional (FO) yang menghubungkan setiap kota di Indonesia.
 - Saat ini sedang dalam studi potensi pembangunan jaringan core backbone FO tersebut.
 - Sementara penyediaan backbone FO masih memerlukan waktu lama, apabila memungkinkan perlu tersedia satelit yang memiliki teknologi mendistribusikan koneksi internet ke titik-titik kota di manapun di Indonesia. Tentu dengan pertimbangan teknologi tersebut relatif murah dari sisi pelanggan.

Solusi terhadap hambatan (2)



- Jaringan Akses :
 - Mendorong tersedianya jaringan akses berkapasitas besar (broadband) ke rumah-rumah (homepassing networks)
 - Mengoptimalkan penggunaan jaringan akses wireless seperti WIFI yang frekuensinya (2.4GHZ) telah dibebaskan.
 - Mengingat jaringan core network nasional juga terbatas, maka solusi menggunakan satelit juga dimungkinkan.
 - Oleh karena itu perlu wadah pengaturan penggunaan satelit di mana dalam market saat ini banyak satelit asing yang menawarkan solusi berbagai teknologi untu koneksi ke PoP di luar negeri.
 - Mengusahakan kemungkinan teknologi satelit yang murah dari sisi pengguna untuk penyediaan bandwidth global dan distribusi akses internet nasional namun juga perlu memperhatikan kondisi geografis Indonesia.
- Local Content (Web) :
 - Perlu dorongan dari setiap instansi agar bahan-bahan publik dari setiap instansi dapat didigitalkan dan dimuat dalam bentuk web yang dapat diakses oleh publik.
 - Perlu dorongan untuk meningkatkan informasi-informasi kepada publik juga tersedia melalui internet
 - Perlunya pengembangan aplikasi-aplikasi komputer yang berbasis web-based.

Penutup



- Sesuai amanat dalam UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, bahwa Pemerintah tidak lagi menetapkan besaran tarif retail dari masing-masing segmen jaringan, hal ini merupakan kewenangan masing-masing operator
- Untuk mendorong penurunan tarif, perlu diupayakan :
 - Kompetisi yang sehat dalam penyediaan jaringan, karena merupakan hal yang esensial baik jaringan akses ke pengguna-pengguna, jaringan inti (core backbone) yang menghubungkan antar kota, dan jaringan backbone internasional.
- Tidak dapat dipungkiri bahwa penyediaan jaringan oleh kalangan penyelenggara dan investor sangat tergantung dari potensi demand yang ada sehingga langkah-langkah *edukasi market* untuk menumbuhkan demand menjadi sangat penting.
- Teknologi ke depan banyak memberikan solusi pengembangan jaringan akses (seperti WIFI dan Wimax), juga peningkatan dalam kapasitas bandwidth sehingga perlu diakomodasi dengan baik.
- Dengan kondisi Indonesia yang relatif masih terbatas ketersediaan jaringan ini, maka penggunaan teknologi yang mutakhir akan menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat penetrasi ketersediaan jaringan



Develop Access of Information through CSR

Sonitha Galad
Corporate Communications Manager, HP

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice



The Power of The Corporations is immense



- Of the world's 100 largest economies, 52 are corporations
- The combined income of the largest 200 corporations is larger than that of 182 nation states – they control 27.5% of the world's GDP
- Thanks to technology, the 200 largest corporations are practically stateless and they employ 1.8 million workers



Corporate Social Responsibility

- CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development

World Bank



**Access to Information,
is it a matter of
affordability?**

Indicators: Basic Access, Household and Individual

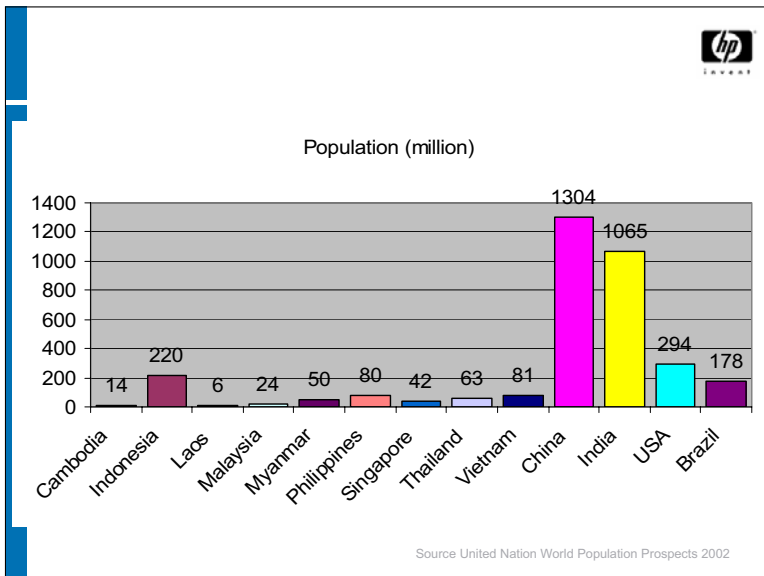


Basic infrastructure and access

- Fixed telephone lines per 100 inhabitants
- Mobile cellular subscribers per 100 inhabitants
- Computers per 100 inhabitants
- Internet subscribers per 100 inhabitants
- Broadband Internet subscribers per 100 inhabitants
- International Internet bandwidth per inhabitant
- Percentage of population covered by mobile cellular telephony
- Internet access tariffs (20 hours per month)
- Mobile cellular tariffs (100 minutes of use per month)
- Percentage of localities with public Internet access centres

Households & Individuals

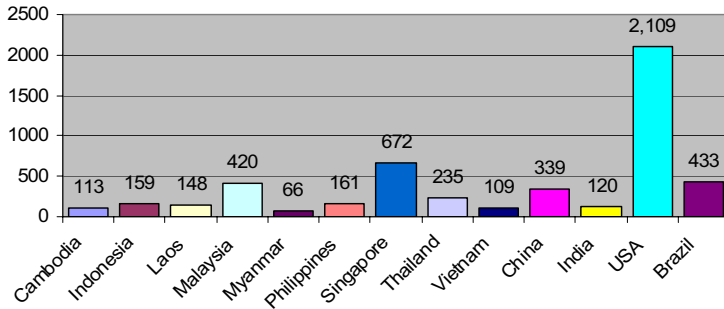
- Proportion of households with a radio
- Proportion of households with a TV
- Proportion of households with a fixed line telephone
- Proportion of households with a mobile cellular telephone
- Proportion of households with a computer
- Proportion of individuals that used a computer
- Proportion of households with Internet access at home
- Proportion of individuals that used the Internet
- Location of individual use of the Internet
- Internet activities undertaken by individuals





The Information Age Indicators

Radios per 1000 people

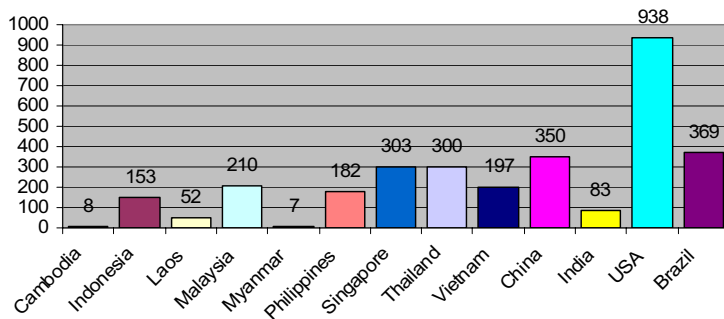


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

Television Sets per 1000 people

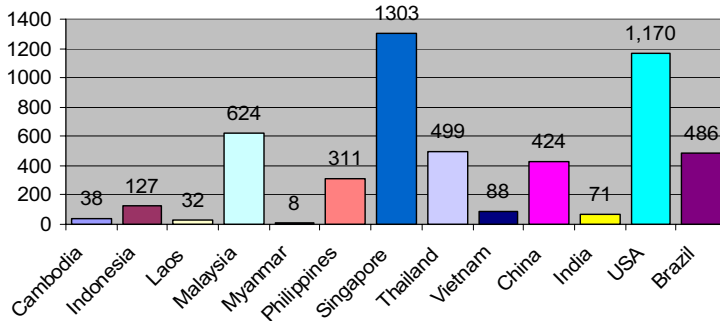


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

Total telephone subscriber per 1000 people

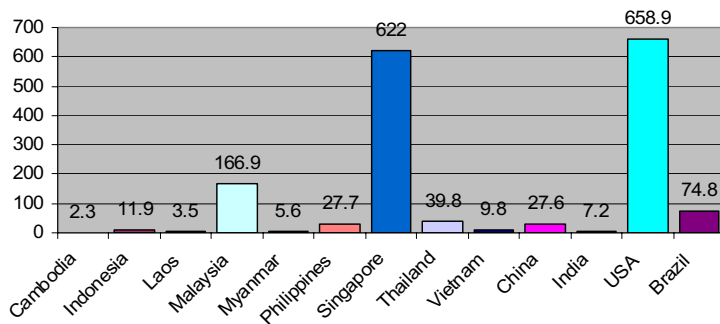


Source ITU Basic Indicator Statistic 2003



The Information Age Indicators

Number of PC per 1000 people

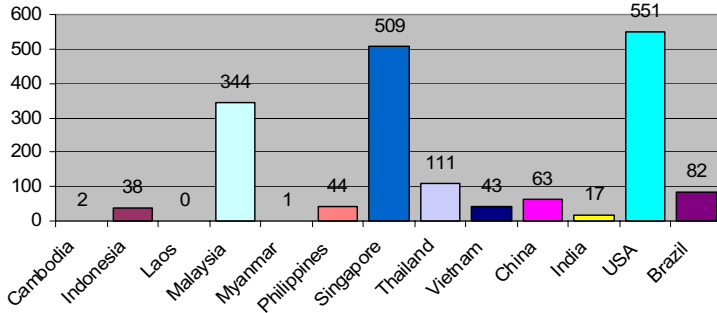


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

PC users per 1000 people

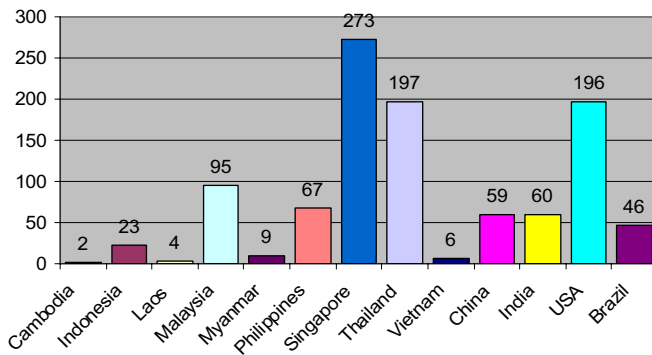


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

Daily newspapers per 1000 people

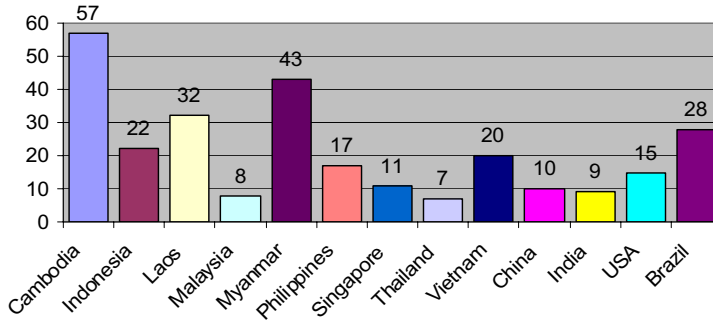


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

Monthly internet price per 20 hour per month (\$)

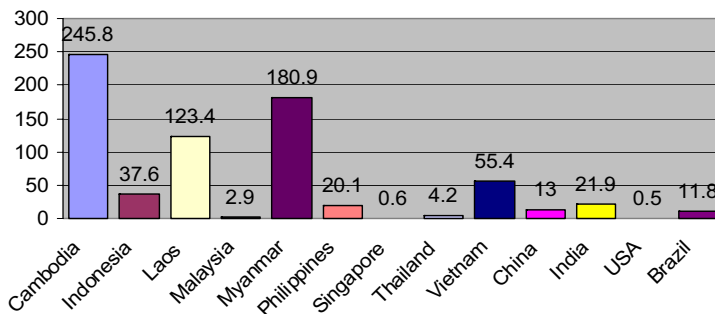


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

Percentage internet price monthly of GNI per capita (%)

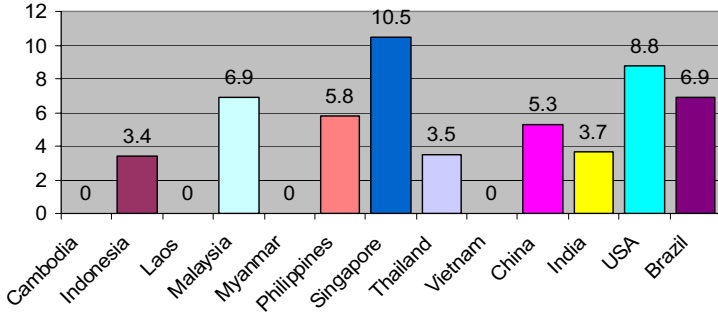


Source World Bank World Development Indicators 2005



The Information Age Indicators

ICT expenditures as percentage of GDP (%)



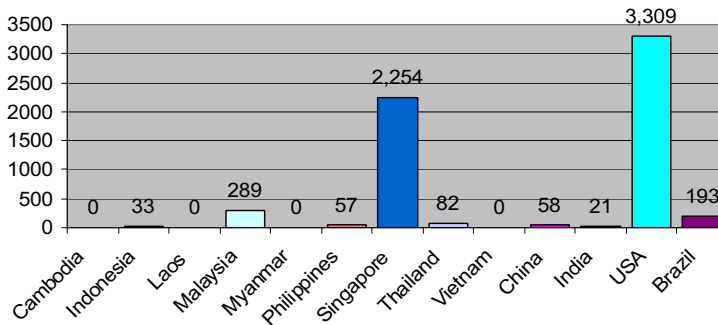
Source World Bank World Development Indicators 2005

16



The Information Age Indicators

ICT expenditure per capita (\$)



Source World Bank World Development Indicators 2005



The Purpose

Quality Human Resources

Productivity

Economic growth

World Competitiveness

Bridging Digital Divide

Literacy

Technical Skills

Quality Content



Change Paradigm

OWN



USE

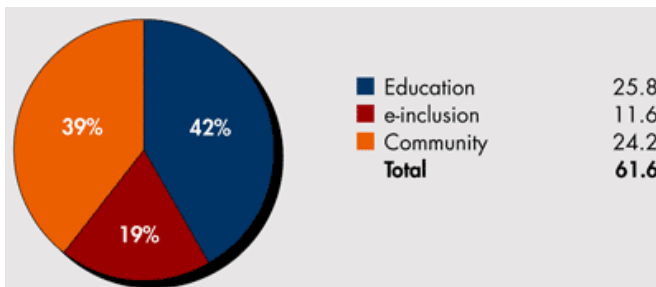


Methods of Funding

- Self Funding
- Alumni's Contribution
- Large organization's philanthropy



Social Investment in HP





Education



HP is your partner in learning:

Working together to transform education for students, parents, faculty, staff, and governments worldwide through better access to information, knowledge, and enhanced IT infrastructures.

Serving the needs of:

- Primary/Secondary Education
- Universities/Higher Education



Education

Needs driving change

	Outcome-based Needs	IT Needs
Common	Transform learning experience with new models and solutions	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual learning environment for "anywhere" access • Integrated Web-based systems for improved access to and management of instructional tools, digital resources, and student information • Centralized, secure database for easy access to data, curricula, and tools • High-powered computing and custom applications for research • Cost-effective IT infrastructure
	Manage costs	
	Ensure compliance	
Primary/Secondary	Improve business processes	
	Freedom to focus on teaching and learning	
Higher Education	Accelerate research outcomes	
	Optimize collaboration for innovation	



Primary/secondary education

Working together to transform education through better **access** to information, knowledge, and enhanced IT infrastructures

Challenge	Solution	Results
Bringing together learning communities: <ul style="list-style-type: none"> Enable students, parents, educators, and staff to easily and securely share information Improve the learning process by integrating existing IT with new capabilities Track academic progress through complete, accurate reporting of student profiles (curriculum, grades, attendance, behavior) 	Making learning more personalized, fun, and engaging: <ul style="list-style-type: none"> Personalize the learning experience Create exciting, innovative ways to learn Make more informed decisions Prepare students for the digital future 	Optimizing IT investments with an agile IT infrastructure <ul style="list-style-type: none"> Respond and adapt to changes in student culture and education policies Improve accountability Drive greater cost savings and productivity



Universities/higher education

Working together to transform education through better **access** to information, knowledge, and enhanced IT infrastructures

Challenge	Solution	Results
Bringing together learning communities: <ul style="list-style-type: none"> Facilitate communication between students, faculty, and researchers Connect classroom, campus, and administrative systems Increase information sharing and tracking to promote research and increase collaboration Support commercialization of research findings 	Making the campus more personalized, innovative, and engaging: <ul style="list-style-type: none"> Transform the "campus" Utilize the Internet and mainstream technologies to deliver new learning tools Enhance students' ability to access distance learning Prepare students for the digital workplace 	Optimizing IT investments with an agile IT infrastructure <ul style="list-style-type: none"> Respond and adapt to changes in student culture and education policy Deliver a better educational experience in a timely fashion Drive greater cost savings and productivity Ensure infrastructure reliability, security, and compliance



Primary/secondary education

HP Managed Learning Solutions

HP Managed Learning Gateway Solutions

Digital classrooms

Collaboration portals

HP Managed Learning Administrative Solutions

Business administrative solutions

Student information systems

Education portal solutions

Library automation solutions

HP Managed Learning Infrastructure Solutions

Security

Mobility

IT Consolidation

Mail and messaging

Management solutions

Printing and imaging



University/higher education

HP Managed Learning Solutions

HP Managed Learning Gateway Solutions

Digital classrooms

Digital libraries

Research

Knowledge networks

High performance
technical
computing

HP Managed Learning Administrative Solutions

ERP solutions

Campus administrative solutions

Education portal solutions

HP Managed Learning Infrastructure Solutions

Security

Mobility

IT Consolidation

Mail and messaging

Management solutions

Printing and imaging



Classroom 2000 (C2K)

HP Services plays key role in world leading education initiative

Challenge	Solution	Results
<ul style="list-style-type: none"> Northern Ireland's ambitious Classroom 2000 (C2K) initiative will allow 350,000 pupils and 20,000 teachers throughout the Province's 1245 schools to take a giant step in the information age. With email addresses and internet access for all pupils, access to virtual classrooms and much more, and efficient infrastructure was vital to the success of the ground breaking project C2K needed a partner that could share the vision but also provide the leading edge technology 	<ul style="list-style-type: none"> Following a stringent selection process, the five year contract went to HP Services and included infrastructure solutions, HP Managed Services, HP Consulting & Integration and security solutions Working with partners, HP is providing the necessary managed services including; network design & bandwidth, messaging/email and internet access & filtering, and the Managed Learning Environment HP also provided a dedicated data centre for delivery of on-line resources 	<ul style="list-style-type: none"> The project will put Northern Ireland to the forefront of the world for e-learning Delivery of world class technology services will enhance both teaching and learning in the Province Standards being set in Northern Ireland will almost certainly be replicated by other countries The support of an educational technology provider will free teachers to spend time on teaching Every teacher, student and family will be connected from their home to the internet and will have their own secure email address Children will have easier access to learning resources inside and outside of the school environment

“The C2K project is a fairly unique requirement and there are elements of the solution for which there are no standards in today’s world. We are dependent on a lot of emerging technology and we felt that HP, particularly with its global presence and its strategic partnerships, was best placed to help us succeed.”



Roy Beattie
Integration director, C2K



NIE

HP helps NIE staff stay connected and informed

As part of the Nanyang Technological University (NTU), NIE is the sole teacher training institute in Singapore. A world-class institute of higher learning renowned for its excellence in teacher education and educational research, NIE's vision of the future is to be an institute of distinction.



Challenge	Solution	Results
<ul style="list-style-type: none"> To create a portal that would bring together disparate hardware and software used by different departments and allow them to share information and communicate effectively To improve e-services and allow access anytime, anywhere 	<ul style="list-style-type: none"> HP Services used BEA Systems and Interwoven platforms to build the staff portal together with its web content management solution NIE staff can use this portal to personalise and access their work/social/personal related portlets (applications) for their day-to-day needs in NIE 	<ul style="list-style-type: none"> The portal provides NIE staff access to information related to work, social and personal matters, as well as news and events NIE staff can track the whereabouts of colleagues through the staff movement tracking system in the portal and create their own personal photo albums and web pages



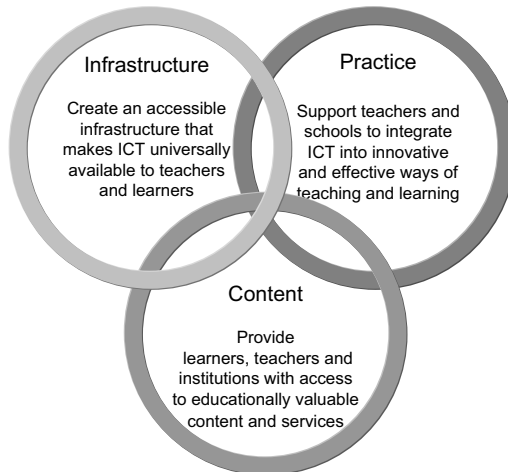
“ HP provided us with the best possible partner experience. They were receptive to our suggestions in making the portal the best it could be to suit our needs. We need to be real partners because only together could we have worked out a solution.”

Associate Professor Philip Wong
Divisional Director of the Academic Computing and Information Services, NIE

Dallas Independent School District



Challenge	Solution	Result
<ul style="list-style-type: none"> Mandated to increase computer-to-student ration Lack of budget to support mandate Keeping pace with desktop technology 	<ul style="list-style-type: none"> 6-year PC Utility contract for 8,000 seats with refresh in 3 years Lifecycle services including acquisition, implementation, deskside support, break/fix, help desk support, project management and asset disposal for the project 	<ul style="list-style-type: none"> PC acquisition, implementation, management and support streamlined Reduction in the total cost of ownership (TCO)





As a teacher...

I want to create and allocate resources online like I do in class.

I want to access and mark work online and record progress.

I want to assign Government standards to the resources.



Jo Berry, Geography Teacher in Amstel Primary School.

Create resources

Assign Government standards

Allocate resources

Evaluate



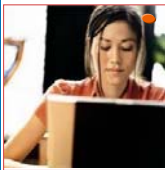
As a teacher...



As a substitute, I want to have a status on the assignments delivered by my colleague ...

I want to ensure students are achieving Ministry of Education curriculum standards

I want to access to professional modules on my teacher's personal page



Jo Berry, Geography Teacher in Amstel Primary School.

Plan and Track

Manage reports

Access to professional modules





As a student...

I want to access my homework from anywhere so I can work wherever I am.

It would also help if my teacher could easily mark my work so I could check my progress.

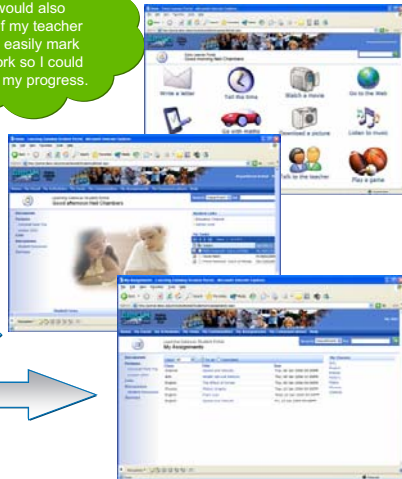


Neil Chambers, student in Amstel Primary School.

Access Anywhere

Personalized environment

Work on line



As a student...

I would like to see my assignments on my planner.

I want easily share my work with the rest of the group.

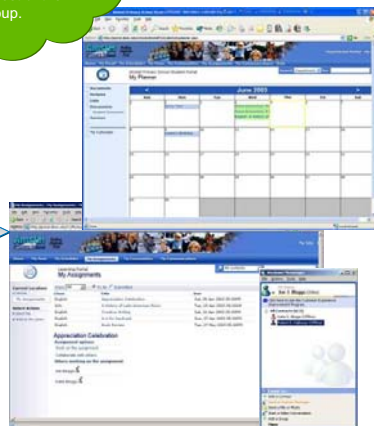


Neil Chambers, student in Amstel Primary School.

Follow-up assignments

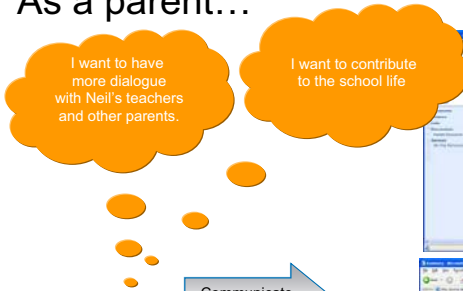
Communicate

Collaborate

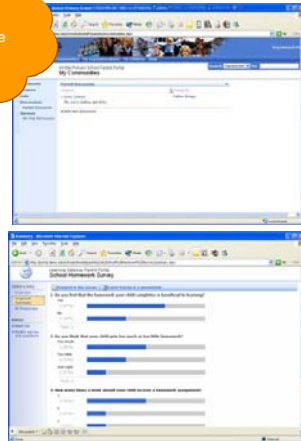
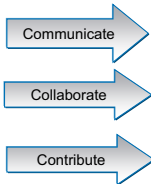




As a parent...



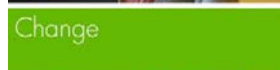
Clair Chambers, Neil's mother



What's different about IT in education?



- The components are the same, but
 - Governance
 - The user
 - The multipliers
 - Administration
 - Environment in the school





Governance

- Who are the stakeholders?
 - Department of Education
 - Town or District Council
 - Schools
 - Someone else
- Who drives strategy?
- Who pays?
- Funding model
 - For the LAN
 - For the WAN



Administration

- Takes place in the school (the multipliers)
- Hierarchical policies
 - National
 - Regional
 - School
- Classes run for short periods 30 minutes to an hour, admin needs to be quick and simple
- Non-technical staff



Environment in the school

- Age of equipment
- Software versions
- Type of equipment
 - PC's
 - Apple
 - Handheld
 - Tablets
- Who manages the desktop/LAN
 - Is it managed?
 - Managed Service
 - School IT Co-ordinator
- How is it managed?
- What are you prepared support
 - Desktop (O/S, patch levels)
 - Browser (s) (version)



Case study: Classroom 2000, Northern Ireland



The Department of Education Northern Ireland (DENI) has selected HP to provide and manage the technology infrastructure for the groundbreaking Classroom 2000 (C2K) education project.



The challenge



- DENI has started an ongoing IT-related programme to help improve the provision of education for all in Northern Ireland
- DENI required the linking of all individual school networks into a Northern Ireland based Online Data Centre, through a single infrastructure. This would need to be an ongoing, managed solution.

The HP solution



- HP Services to provide and manage the infrastructure based on Microsoft technologies
- This encompasses a complete messaging platform migration to Microsoft Exchange 2000 for 375,000 users
- HP Managed Services
- Security services

The results

- Every teacher, student and family will be connected to the Internet and have a secure e-mail address
- A wider range of resources will be available for both teachers and pupils
- Collaboration through e-mail, text and video conferencing
- Children will have easier access to learning resources

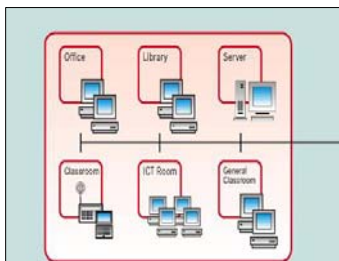


The C2k service

- A ten year program
 - For the provision of an integrated educational technology infrastructure for all Northern Ireland's schools
 - With a committed budget in the region of £500M
- In co-operation with key stakeholders within the Northern Ireland educational community
- Delivered through a number of Managed Service Contracts
- Creating strategic partnerships with industry leading private sector organisations



In-school solution



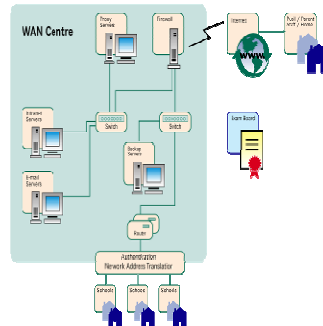
- Local Area Network
 - Computers
 - Printers and other peripherals
 - 1 seat to 10 pupils or better
 - Distributed throughout school
 - Connected to the Internet
 - Accessing a rich range of local content

- Offering school choice of
 - Deployment
 - Composition and
 - the incorporation of existing hardware and software



Wide Area Services

- Data center service incorporating:
 - Mail, messaging and collaborative tools
 - Filtered Internet connectivity
 - Conferencing and publishing facilities
 - Secure file transfer
 - Digital content hosting
 - The creation of a number of Virtual Learning Environments
- Building into an Integrated Managed Learning Environment
- Accessible anywhere and anytime



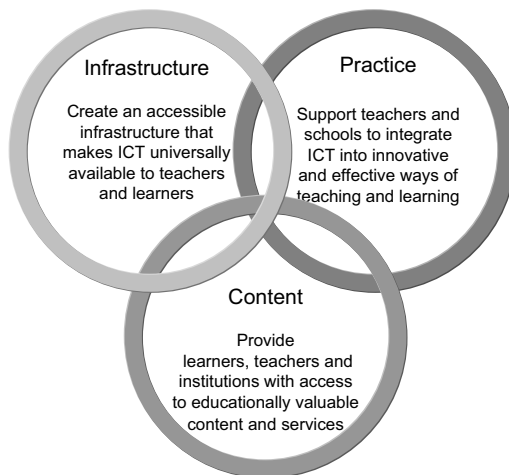
Broadband connectivity

- Based on 2Mbps always on connection
- No additional call charges
- Fast response and download times
- Enabling multiple users to connect simultaneously
- Practical use of audio & video media
- Facilitates delivery of rich multi-media material to support teaching & learning



The Prime Integrator

- The strategic role of HP
- Providing a TAMED Technology
 - Trusted, secure and reliable
 - Accessible anywhere at any time
 - Managed off the educational agenda
 - Expandable, scalable and embracing new technologies
 - Developing to meet the changing needs of the service





**Menyikapi Kendala Pengadaan Buku
Pelajaran Murah dan Upaya Menemukan
Solusi untuk Mendukung Terwujudnya
Perluasan Akses Informasi dan
Pengetahuan**

**Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
10 Februari 2006**

Permendiknas No 11 Tahun 2005

- ◆ Pemberlakuan buku pelajaran 5 tahun
- ◆ Buku pelajaran harus lulus penilaian BSNP
- ◆ Guru dilarang menjual buku ke siswa
- ◆ Buku pelajaran harus diberi label harga

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

◆ Komponen Harga Buku versi IKAPI

- Cetak: 35%
 - ◆ Kertas
 - ◆ Tinta
- Penerbit: 65%
 - ◆ Editorial – 15%
 - ◆ Royalti – 10%
 - ◆ Marketing & Overhead – 30%
 - ◆ Keuntungan Perusahaan – 10%

◆ Komponen Harga Buku versi Pusbuk:

- Cetak: 60% -
- Penerbit: 40%

Kendala Pengadaan Bupel Murah Pasca Permendiknas

- ◆ Spesifikasi buku yang disyaratkan oleh BSNP standardnya cukup tinggi sehingga mempengaruhi harga jual (mis. HVS 70gr)
- ◆ Rabat penjualan ke toko buku cukup besar sehingga mempengaruhi komponen dari harga jual (mis. Gramedia menerapkan rabat 35 % dengan sistem konsinyasi)
- ◆ Murid harus mengeluarkan uang ekstra untuk ongkos ke toko buku (lokasi toko buku hanya di kota-kota besar).

Kendala Akses Ilmu Pengetahuan

- ✦ Dengan pemakaian buku 5 tahun murid terhambat untuk mendapat update informasi ilmu pengetahuan terbaru
- ✦ Dengan keharusan membeli buku hanya di toko buku murid kesulitan memperoleh buku karena toko buku tidak tersedia di semua kota/Kabupaten.

Solusi Mendukung Perluasan Akses Informasi dan Pengetahuan

- ✦ Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan
- ✦ Pemerintah menggerakkan MNC untuk menyumbang ke sektor pendidikan sebagai *Corporate Social Responsibility*
- ✦ Penerbit diizinkan mengubah spesifikasi buku yang lulus BSNP:
 - Kertas: dari HVS ke koran
 - Warna: dari 4 warna ke 1 warna
 - Jumlah halaman dikurangi
- ✦ Penerbit diizinkan menjual buku di koperasi sekolah
- ✦ Perkembangan ilmu pengetahuan harus terus di-update
- ✦ Rabat penerbit terhadap toko buku juga "diteruskan" kepada konsumen.
- ✦ Penerbit mendapatkan Insentif untuk pajak pembelian kertas

Open source dan Copy-Left Sebagai Alternatif solusi bagi terwujudnya Akses Informasi dan Pengetahuan yang mudah dan terjangkau

Oleh:
Sumitro Roestam
Ketua MASTEL

Semiloka: Menemukan Solusi terhadap Identifikasi Faktor-faktor Penghambat "Access to Information and Knowledge" Guna Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pemanfaatan ICT Tahun 2006

Hotel Red Top, Jakarta, 10 Februari 2006

1

Sistematika Presentasi

- Open Source
- Free Software Foundation
- Free Software & Copy-Left
- Free Software vs Open Source
- Free Software Projects
- GNU Public License
- GPL vs Open Source
- Copy Right
- FOSS di Malaysia
- Menghemat Devisa dengan OSS
- Solusi2 Murah pakai LINUX
- Entrepreneur LINUX

2

OPEN SOURCE (1)

- OpenSource is a style of software licensing and distribution, related to FreeSoftware
- The consumer of an open source program has the rights to do the following things to the source code:
 - read it
 - use it
 - modify it
 - distribute it
 - charge money for services related to it, such as copying or support, so long as they do not infringe on the freedoms of others

3

OPEN SOURCE (2)

- Open source isn't PublicDomain. That means there is a license involved and the license has restrictions, which can include:
 - distribution must be free
 - modifications must be distributed
 - original authors must be acknowledged (i.e. the BerkeleyStandardDistribution license, although the advertising clause has been rescinded July 22, 1999.)
 - derivatives must be similarly licensed (i.e. the GnuGeneralPublicLicense)

4

OPEN SOURCE (3)

- Licenses vary considerably on which of and how these restrictions apply. FrankHecker has written a clear (though long) piece that explains the variations.
 - <http://www.hecker.org/writings/setting-up-shop.html>
- Depending on the Software, there are quite a long list of licenses involved in OpenSource:
 - <http://www.opensource.org/licenses/index.html>
- EricRaymond, author of TheCathedralAndTheBazaar and TheHalloweenDocument commentary, and others have founded an organization and site to promote the concept.
 - <http://www.opensource.org/>

5

Corporate OPEN SOURCE (1)

- Roles defined:
 - Development Coordinator: someone who is responsible for maintaining a single codebase, i.e. revision controller. This person is clearly known and respected in his/her role.
 - Developers: People directly involved with development of the software. Usually in close contact with the coordinator, and in fact these roles can overlap or be rotated.
 - Co-Developers: Also sometimes know as Users. Offer feedback, advice and fixes, however, are not directly involved in development.
 - Beta testers: Users in the sense of ClosedSource customers. I.e. find bugs and give feedback but lack the know-how/time to fix the bug directly in the code.

6

Corporate OPEN SOURCE (2)

- Global code ownership: no single person owns the code.
- Release early & often: a short iterative cycle.
- Users can be co-developers: extending the *two heads are better than one* principle to many heads.
- PairVersionControl: because of the centralised development coordinator, at least two pairs of eyes check any changes in the main codebase.
- Unwritten rules: for handing over control of the codebase to someone else, and for preventing version fragmentation.
- *Plan to throw one away; you will anyhow* is quoted by Raymond from [TheMythicalManMonth](#).
- *Perfection (in design) is achieved not when there is nothing more to add, but rather when there is nothing more to take away.* is quoted by Raymond from [AntoineDeSaintExupery](#)
- Lots of Feedback: from beta testers and users.

7

OPEN SOURCE Development

- Websites involved in Open Source Dev:
 - [Gnu Project](#)
 - [FreshMeat](#)
 - [SourceForge](#)
 - [Asian Open Source Centre](#)
 - CSharp-Source.Net (<http://csharp-source.net>)
 - [PosseNet](#)
 - Java-Source.Net (<http://java-source.net>)
- People involved in Open Source:
 - [Eric Raymond](#)
 - [Linus Torvalds](#)
 - [Ricardo Moral](#)
 - you?
 - and many more !

8

Free Software Foundation

- RichardStallman and the FreeSoftwareFoundation reject "Open Source".
- They promote FreeSoftware, which is philosophically distinct (and predates OS by about a decade).
- However, FreeSoftware is often considered to be a subset of the OpenSource movement.

9

Free Software & Copy-Left Software

- FreeSoftware is software which users can freely:
 - Run, for any purpose
 - Study and modify for their own needs
 - Redistribute copies (charging for them if they wish)
 - Improve and release the changes to the public
- CopyLeft software is FreeSoftware with these additional conditions:
 - The source code must be made available to users
 - Copies cannot be redistributed under a non-FreeSoftware license

10

Free Software Movement

- The FreeSoftwareMovement was started by RichardStallman of the FreeSoftwareFoundation and the GnuProject (<http://www.gnu.org>). The GNU Project philosophy area (<http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html>) has a number of texts about why RichardStallman and others support FreeSoftware.
- Note that 'free' here refers to a philosophical notion of freedom, not to price, and that this page is about RichardStallman and the FreeSoftwareFoundation's definition of FreeSoftware.

11

Free Software vs Open Source

- FreeSoftware is related to, but not the same as, OpenSource software. In the words of RichardStallman:
 - FreeSoftwareMovement [...] is concerned not only with practical benefits but with a social and ethical issue: whether to encourage people to cooperate with their neighbors, or prohibit cooperation. The FreeSoftwareMovement raises issues of freedom, community, principle, and ethics, which the OpenSource Movement studiously avoids.
- -- RichardStallman in a May 2000 SlashDot interview [<http://slashdot.org/interviews/00/05/01/1052216.shtml>]

12

Free Software Projects

- Notable FreeSoftware projects include
 - The GnuLinux OperatingSystem
 - PerlLanguage, PythonLanguage, and RubyLanguage
 - TeXTheProgram and LaTex
 - Most of the WikiWikiClones
- Notable non-CopyLeft FreeSoftware projects (previously included in the list above) include:
 - The *BSD family of OperatingSystems (FreeBsd, NetBsd, OpenBsd, DarwinOs)
 - The Apache Web server (<http://www.apache.org/>)
 - The X11 Windowing system (<http://www.x.org/>)
 - PerlLanguage (dual-licensed)

13

GNU General Public License

- The GNU General Public License is the CopyLeft
- The GNU GPL is a FreeSoftware license that works like this: If I distribute a program licensed under the GPL, I must ensure that the recipients can also get the source code (typically either by distributing it to them along with the program, or by offering to provide it on request to anyone who asks). The recipient can take that code, use it, and improve it for free, but if they want to distribute their improvements, the same restriction applies: their version must also be GPLed. This way, once you make your product and release it, anyone else can improve that product, creating a community of programmers to build a program rather than one business or a single programmer.

14

Religious Differences: GPL vs OpenSource

- The GPL is often described as an OpenSource licence. This is true in the sense that it fits the OpenSourceDefinition, but would probably upset its inventor RichardStallman, who has stated on many occasions that he is not part of the "Open Source" movement and would doubtless prefer it be known as a FreeSoftware licence.
- *From a number of interviews, RMS has said that it's fine with him to say that the GPL is an OpenSource-compatible license, because that is a true statement. He bristles at being called an "Open Source" advocate, because he is no such thing. He's nothing if not precise.*

15

Does the GPL allow me to sell copies of the program for money?

- *Yes, the GPL allows everyone to do this. The right to sell copies is part of the definition of free software. Except in one special situation, there is no limit on what price you can charge. (The one exception is the required written offer to provide source code that must accompany binary-only release.)*
- *But note that the GPL allows anyone who buys a copy to redistribute it. You may be able to sell GPL'd software, but only if you find people who aren't willing or able to share data with each other for some reason. That number is rapidly decreasing.*

16

CopyRight (1)

- A legal right granted by various governments to individuals and corporations.
- The opposite of CopyLeft
- *If it is the opposite then why does CopyRight law protect CopyLeft? CopyLeft is a type of license protected by CopyRight*
- More important that CopyRight is CopyShould

17

CopyRight (2)

- RichardStallman saw the protections copyrights offer being used to create licenses that limit users rights. He saw that he could use those same protections to create contracts that would limit the rights of those who license software to limit users rights.
- It's called fighting fire with fire, and his direct target is exactly the thing that he is troubled by. Yes, others get hurt indirectly (software is not as interoperable as it would be if all software was proprietary or all software was free).
- The blind user in me wants the interoperability, period.
- The thoughtful futurist will take the current situation over interoperability with proprietary code dominant. Because I believe that code that is available to all readers and coders is better code. And I mean better from everything from the ethical to the suiting-its-purpose sense.

18

Free dan Open Source Software di Malaysia (1)

- Malaysia stands out in the free and open source software (FOSS) movement, mainly because there's a fairly well organized FOSS movement, the media is FOSS-aware, and there's support from the government for FOSS usage.
- Like-minded individuals meet up, they enjoy similar company and share similar ideas. Then a mailing list gets formed. And you can say the rest is history, right?
- Malaysia is still a developing nation, trying to achieve developed status by the year 2020, FOSS helps pave the road towards moving the economy towards a technology driven, knowledge-based one. Allowing one to "peek under the hood" and learn how some piece of software works, is crucial to a nation where skills are still being developed. It allows a nation to play a part in the international software community, and not be dependent on 100% foreign built proprietary software.

19

FOSS di Malaysia (2)

- FOSS deployment has now been institutionalized, and the government pushed two feasibility studies to push the open source agenda. The main reasons cited include, but aren't limited to: reducing the total cost of ownership, increase the freedom of choice for software usage, hence increasing the growth of the local ICT (get acronym definition) industries. Bridging the digital divide.
- Pressure is being added to protect intellectual property and reduce piracy, which all seem to point in the direction of a boon to the FOSS world in Malaysia as more companies take it up on the desktop.
- As a bid to help more home users get cheaper PC's, the "One Home One PC" campaign was launched a few years back that aimed to sell a full-blown Linux PC for under USD\$250. These machines came custom-configured with Fedora Core 1, with fully working hardware, and all the multimedia and educational software home users felt comfortable with.

20

FOSS di Malaysia (3)

- In a country as diverse as Malaysia, where the main spoken languages besides English include Bahasa Malaysia, Tamil, Mandarin, Cantonese and a few more dialects, localization is a large part of the open source movement.
- The MyOSS Magazine, started mid-2005, went up to six editions last year, and started off as one man's itch to educate both the Malaysian OSS community as well as the international one. Some key articles included open source power management, developing applications with PHP, as well as Linux LiveCDs.
- Community run low-cost LPI Certification exams were run twice last year, enabling about sixty candidates to take the LPI101 and LPI102 examinations, allowing the locals to be LPI Certified.

21

Menghemat Devisa Puluhan Trilyun Rupiah dengan OS Software

- MenRISTEK di KOMPAS 13 Juni 2005:
 - Diperlukan US\$3400/Warnet untuk Proprietary Operating System S/W
 - Untuk 4000 Warnet = US\$13,6 juta untuk Proprietary Operating System
 - Bila ditambah software aplikasi lainnya dan untuk seluruh Lembaga, Institusi, Perusahaan, UKM, individu, dll, maka jumlah tersebut bisa mencapai Rp1.224 Trilyun

22

PC Rakyat Murah

- *PC RAKYAT (PC MuRAh Kecepatan DahsYAT)* adalah PC dalam suatu jaringan komputer berbasis Linux yang kemampuannya telah dioptimalkan sehingga memiliki kecepatan setara dengan induknya (Server)
- Anda bisa memiliki PC dengan kecepatan P IV 3.x GHz atau AMD Athlon tercepat hanya dengan uang ratusan ribu rupiah.
- Anda bisa *menyulap* PC-PC lama (486 / P I / P II / P III) menjadi secepat P IV 3.x GHz atau lebih.
- Anda bisa mendapatkan Buku, CD, Training dan Networking Linux secara GRATIS.

(Sumber: www.pclinux.web.id)

23

Keuntungan pakai LINUX OS

- Gratis/Murah
- Mudah memasang dan memakainya
- Aplikasi lengkap:
 - Hampir semua aplikasi yang ada di Windows bisa Anda temukan padanannya di Linux. Mulai dari aplikasi Multimedia, Office, Game, Graphic, Internet, Development, 3D, dll.
- Mendukung program IGOS
- Menghargai HAKI tanpa keluar uang Jutaan Rupiah

24

Solusi Murah Bisnis Warnet (1)

- **PAKET HEMAT WARNET**

- * 10 Client PC Linux speed s/d P IV 3.x GHz
- * Networking (Hardware & Setup LAN)
- * Training Linux Desktop & Internet
- * Desktop Win-XP Style
- * Deepfreeze untuk Linux
- **Biaya Rp. 13.500.000**
- **PC Server :**
 - * Harga diatas tidak termasuk PC server. PC server disediakan pemesanan, min. P IV dengan memori 512 Mb dan HD 40 Gb.
- **Spek. PC Client:**
 - * P I upgraded up to P IV 3.x GHz
 - * RAM fisik 32 Mb, RAM Virtual = RAM Server (min. 512 MB)
 - * HD virtual 40 Gb
 - * Monitor 15"

25

(Sumber: www.pclinux.web.id)

Solusi Murah Bisnis Warnet (2)

- **PAKET HEMAT UPGRADE WARNET**

PC Client Warnet Anda menggunakan P I / P II / P III ?
Anda bisa mengupgradenya ke speed s/d P IV 3.x GHz dengan biaya yang sangat MURAH + software 100% LEGAL + bebas dari gangguan virus.

- * **Biaya Normal upgrade speed ke P IV s/d 3.x GHz Rp. 250.000 / PC**
- * **Biaya Paket Hemat Upgrade Warnet Rp. 200.000 / PC**
- * **Desktop Win XP Style + Deepfreeze Rp 1.000.000 / 10 PC**

NB:

PC server min. P IV dengan memori 512 MB.

26

(Sumber: www.pclinux.web.id)

Solusi Murah untuk Sekolah

- **PAKET HEMAT LAB SEKOLAH**

- * 10 Client PC Linux speed s/d P IV 3.x GHz
- * Networking (Hardware & Setup LAN)
- * Training Linux Desktop & Internet
- * Desktop Win-XP Style
- Biaya Rp. 13.000.000

NB: PC Server :

* Harga diatas tidak termasuk PC server. PC server disediakan pihak sekolah, min. P IV dengan memori 512 Mb dan HD 40 Gb.

- **PAKET HEMAT UPGRADE LAB SEKOLAH**

PC Lab Sekolah masih menggunakan P I / P II / P III ?
Anda bisa mengupgrade PC lama tersebut ke speed s/d P IV 3.x GHz dengan biaya yang sangat MURAH + software 100% LEGAL + bebas dari gangguan virus.

- * Biaya Normal upgrade speed ke P IV s/d 3.x GHz Rp. 250.000 / PC
- * Biaya Paket Hemat Upgrade Lab Sekolah Rp. 200.000 / PC

NB: PC server min. P IV dengan memori 512 MB.

(Sumber: www.pclinux.web.id)

27

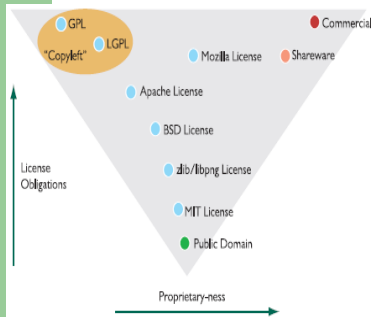
Entrepreneur berbasis LINUX

- * **Linux Education**
 - Training Linux
 - Workshop Linux
- * **Linux Commerce**
 - Hardware / PC RAKYAT (PC MuRAh Kecepatan DahsYAT)
 - Software / CD Distro Linux
 - Pernix (berbagai macam asesoris dengan logo Linux)
 - Buku & Majalah
- * **Linux Solution**
 - Thin Client PC
 - Migrasi ke Linux
 - Upgrade Speed PC
 - Warnet / Lab Linux

(Sumber: www.pclinux.web.id)

28

Software License Overview



- Tiap sudut merupakan Primary License Type
- Public Domain = Tanpa License
- GPL & Commercial License memiliki obligasi License tertinggi, tetapi pada posisi yg berlawanan dlm skala proprietary-ness tentang source code ownership dan availability

29

Business Value dari Open Source

	Cost Reductions	Technology Transparency	Security/Risk Management	Time to Market	New Opportunities
Culture of Community	●●	●●●	●	●●	●●
Moving Up the Stack	●●●	●●	●●	●●	●●
Mission Critical	●●	●●	●●	●●	●●
Sweet Spot	●●●	●●	●●	●●	●●
Software Revolution	●●	●●	●●	●●●	●●
At Your Service	●●	●●	●●	●●	●●●
Invisible Man	●●	●●	●●	●●	●●
Market Force	●●●	●●	●●	●●	●●
New Domains	●●	●●	●●	●●	●●●
Fun Factor	●●	●●	●●	●●	●●



* cost reductions (outsource, open source, commodity computing, etc)
 * technology transparency (easier to integrate, interoperate and adapt)
 * security/risk management (higher availability due to lower vulnerability)
 * time to market (faster deployments = competitive edge)
 * new opportunities (new business possibilities with open source)

30

Open Source = Bebas dari Resiko Closed Source

- Industri Open Source = Industri Mobil
- Kita bisa ganti merek mobil tanpa harus banyak belajar memakainya
- Analogi Open Source, kita bisa ganti Distro Linux tanpa harus banyak belajar memakainya
- Resiko Closed Source: bila Software House-nya tutup atau dibeli orang lain, maka bisa tidak ada support lagi, dan kita harus bayar mahal untuk menggantinya
- Contoh lain: Saat kita harus upgrade ke Y2K, maka kita harus bayar mahal sekali ke Perusahaan Closed Souce tanpa ada pilihan lain!
- Secara logis: YLKI harus mendukung Open Source, sebab Open Source berarti kebebasan Konsumen untuk upgrade, customization, ganti merek, tanpa harus bayar mahal dan terikat ke satu supplier (OS = full competition)

31

Terimakasih atas perhatiannya

<http://www.masif.com>
MASYARAKAT INFORMASI

32



MEDEKATKAN INFORMASI KEPADA PENGGUNA SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERLUASAN AKSES PENGETAHUAN

Dra. Jusni Djatin Apt, Ir. Sri Hartinah, MSi
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Disampaikan pada Semiloka/Workshop Menemukan Solusi Terhadap
Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat "Access to Information and
Knowledge" Guna Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemanfaatan ICT,
10 Februari 2006

Pengetahuan

- Pengetahuan adalah suatu kekuatan, suatu aset
- Dengan pengetahuan, kehidupan kita menjadi berkembang, lebih baik, dan berhasil
- Pengetahuan dimiliki oleh setiap individu yang ada dalam organisasi. Tanpa pengetahuan yang dimiliki mereka, kegiatan atau bisnis tidak bisa berjalan
- Pengetahuan terdiri dari :
 - pengetahuan tacit (tacit knowledge) - terdapat pada pikiran. Untuk mendapatkan informasi langsung, dibutuhkan data pakar dan siapa mengerjakan apa
 - pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) - terekam

Pengetahuan (2)

- Informasi merujuk pada pengetahuan eksplisit, yang merupakan hasil dari kumpulan dan komunikasi dari ide-ide dan pengalaman-pengalaman
- Informasi tersebut disusun dalam bentuk dokumen, e-mail, voice mail, dan bentuk lain dari komunikasi yang dapat dengan mudah dibagi (share) dengan yang lainnya
- Pengetahuan eksplisit ini telah ditulis dalam berbagai format, dan bermanfaat karena dapat disimpan dan digunakan kembali untuk menghindari duplikasi kegiatan dan menghindari pengulangan kesalahan-kesalahan

3

Pengetahuan (3)

- Pengetahuan mewakili inteligensi individu yang dengan kemampuannya dapat memanfaatkan data dan informasi, serta pengetahuan untuk membuat suatu kesimpulan, keputusan, dan menciptakan pengetahuan baru. Tanpa adanya inteligensi dan kemampuan individu ini, tentu tidak akan tercipta pengetahuan baru
- Pengelolaan pengetahuan adalah memperlakukan pengetahuan sebagai aset yang harus dikelola, digunakan, dipelihara, dan dikembangkan untuk memberi manfaat pada organisasi dan masyarakat

4

Permasalahan Pengelolaan dan Diseminasi Pengetahuan Eksplisit (informasi iptek)

- **1. Informasi iptek**
 - Ledakan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan kesulitan untuk mengikuti perkembangan pengetahuan meskipun dalam bidangnya
 - Informasi yang dihasilkan tersebar, belum di dokumentasikan secara terpadu sehingga sukar untuk diakses
 - Masing-masing institusi sudah mengelola basis datanya, tapi belum dilakukan integrasi basis data dengan instansi sejenis
 - Dalam menentukan kebijakan, meneliti, belajar dan mengajar serta berusaha belum didukung dengan informasi yang lengkap
 - Munculnya budaya elektronik

5

Permasalahan (2)

- **2. Diseminasi informasi iptek**
 - Informasi yg dihasilkan belum dikemas kembali sehingga tidak bisa diterapkan
 - Jaringan informasi iptek belum tertata dengan baik
 - Pola penyebaran informasi masih bersifat terpusat pada lembaga tertentu
 - Beberapa unit diseminasi informasi telah dibangun dan dikembangkan, a.l. Warintek (PDII-LIPI), Warintek plus (RISTEK), Telecenter (Bappenas-UNDP), *Community Access Point* (Depkominfo), MASIF UI (Masyarakat Informasi UI), dll.

6

Permasalahan (3)

3. Pengguna informasi

- Pengguna informasi tidak mengetahui informasi yang tersedia dan dimana disimpan?
- Banyak pemakai informasi datang ke beberapa perpustakaan dan pusat informasi utk mencari informasi
- Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang akses informasi
- Jauhnya jarak perpustakaan dan pusat informasi dg pengguna
- Harapan yang besar dari pencari informasi agar mereka bisa memperoleh informasi dengan mudah, murah dan cepat

4. Pendanaan

- Kondisi anggaran yg sangat terbatas (baik pengelola informasi maupun pemakai informasi) berdampak pada terbatasnya koleksi dan layanan informasi iptek, SDM dan fasilitas yang disediakan

7

Upaya yang Dapat Dilakukan

- Mendekatkan informasi ke pengguna melalui beberapa kegiatan berikut:
 - Menjamin arus komunikasi dan informasi yang bebas dan merdeka (bertanggungjawab) dengan memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi
 - Mengembangkan perpustakaan digital
 - Menyelenggarakan pendidikan melek informasi

8

Upaya (2)

- Keterbatasan koleksi, fasilitas, dana, SDM diatasi melalui:
 - Dukungan dana yang memadai
 - Membentuk jejaring bagi pengelola informasi untuk memanfaatkan koleksi informasi bersama (resource sharing) untuk layanan informasi
 - Memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat

9

Upaya (3)

- Pengelola informasi di perpustakaan dan pusat dokumentasi dan informasi :
 - Dapat memelihara informasi, juga harus menjadi fasilitator dan navigator
 - Secara aktif mendigitasi informasi yang dimiliki
 - Membangun pangkalan data secara terpadu
 - Memberikan kemudahan akses informasi
 - Proaktif mengembangkan dan memasarkan informasi
 - Memberikan bimbingan bagi pemakai informasi
 - Membangun dan mengembangkan kerjasama jaringan dengan instansi sejenis dalam rangka pemanfaatan koleksi informasi bersama

10

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI

- Didirikan sejak 40 tahun yang lalu (1 Juni 1965)
- Deposit publikasi hasil penelitian LPND tapi belum lengkap
- Mendokumentasikan karya ilmiah Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri
- Meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses informasi serta pemberian layanan informasi
- Membangun sistem berbasis pengetahuan

11

Koleksi PDII sampai 1 Januari 2005

- Buku, tesis S2 & S3, prosiding seminar 77.312 judul
- Laporan penelitian 38.252 judul
- Paten Indonesia 7.364 judul
- Paten negara lain 4.679 judul
- Majalah Ilmiah Indonesia 2.859 judul
- Mikrofis/mikrofilm >60.000 judul (termasuk 52 judul koran daerah hasil kerjasamana dengan KIT dan KITLV(Belanda), Library of Congress, termasuk yang dibuat oleh di PDII)

12

Kerjasama

- Kerjasama sangat diperlukan dalam upaya mengumpulkan koleksi informasi untuk layanan informasi
- Kerjasama yang telah dilakukan adalah:
 - Kementerian Riset dan Teknologi - Riset Unggulan Terpadu, Warintek Plus (dokumentasi hasil penelitian daerah, TTG, dan akses informasi), CISCO, Wanita, dll.
 - Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM - dokumen paten Indonesia
 - Kerjasama jaringan informasi keanekaragaman hayati
 - LPND (koordinasi pendokumentasian publikasi hasil penelitian LPND)
 - Perguruan tinggi (lemlit dan program pasca sarjana)
 - KITLV dan Library of Congress dalam pelestarian bahan pustaka

13

Basis Data

- **Basis data teks lengkap**
 - Karya ilmiah LIPI (5.383 judul)
 - Paten Indonesia (7.364 judul)
 - Laporan Akhir Riset Unggulan Terpadu (1.000 judul)
- **Basis data bibliografi dgn abstrak**
 - Artikel Majalah Ilmiah Indonesia (99.005 judul)
 - Laporan Penelitian (35.179 judul)
 - Buku, tesis S2 dan S3, prosiding, dll. 77.312 judul
 - Teknologi Tepat Guna (15.721 judul)
 - Wanita dan Anak (11.099 judul)

14

Basis Data (2)

- Riset Unggulan Terpadu (3.120 judul) yang terdiri dari : Abstrak Laporan Akhir RUT, Penawaran Teknologi, Tracking Hasil penelitian
- Pangkalan data keanekaragaman hayati
- Pangkalan data permasalahan sosial budaya ,masyarakat > 500 judul
- Pangkalan data Terbitan Berseri Indonesia yang mempunyai ISSN
- Pangkalan data Direktori Perpustakaan Khusus
- Pangkalan data pengetahuan tradisional: tanaman obat, zat warna alami, dll.

15

Diseminasi dan Akses Informasi

- Terbitan sekunder tercetak : indeks dan abstrak
- Pangkalan data dalam CD-ROM
 - kedua terbitan tersebut diberikan kepada instansi pengguna jasa potensial seperti perpustakaan LPND, UPT perpustakaan perguruan tinggi, litbang daerah, pengelola Warintek, perpustakaan daerah.
- Akses ke pangkalan data PDII melalui website dengan alamat : www.pdii.lipi.go.id dan OPAC Online Public Access Catalogue
- Produk kemasan informasi dan layanan informasi
- Sumber Informasi Ilmiah Global : Akses ke Databases dan Jurnal (Buku Saku yang memuat alamat jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui Internet)

16

Layanan Informasi Elektronik

- Pangkalan data bibliografi dan sebagian dengan abstrak lebih dari 250.000 judul
- Baru 5% dalam bentuk teks lengkap
- Publikasi yang banyak digunakan oleh pengguna adalah Majalah ilmiah Indonesia dan asing
- Pangkalan data teks lengkap untuk majalah Indonesia dan laporan penelitian, belum dibangun
- Jurnal ilmiah asing tercetak yang dilanggan PDII tahun 2005 adalah 40 judul, 20 judul diantaranya dapat juga diakses lewat Internet. Tahun 2006 berlangganan 82 judul majalah luar negeri, 12 majalah Indonesia, dan 4 koran ibukota.

17



Kemasan Informasi

- Merupakan suatu terbitan baru yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan calon pemakai yang akan menggunakannya
- Kemasan ini biasanya digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat, membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada
- Kemasan untuk masyarakat pedesaan harus singkat, dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti
- Penyajian informasi bisa dalam bentuk tercetak dan elektronik (Web, CD-ROM)
- Contoh: Panduan Usaha, Pohon Industri, Penawaran Teknologi, Informasi lokal/setempat, Dll.

18

Penggalangan Basis Data Daerah

- Banyak informasi yang dihasilkan di daerah dan tentang daerah harus didokumentasikan dan didesiminasikan kepada masyarakat
- Jenis informasi: publikasi hasil penelitian, termasuk pengetahuan tradisional di daerahnya
- Pengetahuan tradisional harus dikumpulkan, dilestarikan dan disebarluaskan
- Perlu dukungan kebijakan dalam pendokumentasian informasi tentang daerah
- Kerjasama instansi terkait a.l. perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, swasta, LSM, dll. untuk mendokumentasikan dan menyebarkan

19

Menyelenggarakan Pendidikan Melek Informasi

- Melek informasi adalah serangkaian kemampuan untuk:
 - Mengetahui kapan informasi dibutuhkan
 - Mengidentifikasi informasi dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan untuk menemukan lokasi informasi secara efektif dan efisien
 - Mengakses informasi secara efektif dan efisien
 - Mengelola dan mengintegrasikan informasi yang diperoleh ke dalam pengetahuan yang ada
 - Menggunakan informasi secara etis dan legal
 - Mengkomunikasikan informasi
- Melek informasi saat ini di Indonesia masih rendah

20

Penutup

- Pengetahuan merupakan suatu kekuatan, aset yang harus dikelola, digunakan, dipelihara, dan dikembangkan untuk menciptakan pengetahuan baru yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat
- Teknologi informasi adalah sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap kemudahan akses ke pengetahuan
- Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan kemudahan akses informasi adalah masalah pada ketersediaan sumber-sumber informasi, diseminasi informasi, pengguna informasi dan pendanaan

21

- Solusi dari permasalahan ini adalah mencakup:
 - Memperkuat upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya
 - Kerjasama instansi terkait a.l. perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, dll. untuk mendokumentasikan dan mengembangkan basis data dari publikasi hasil penelitian secara terpadu untuk :
 - mengatasi keterbatasan koleksi, dana, SDM dan sarana
 - mencegah duplikasi kegiatan
 - menghindari pengulangan kesalahan-kesalahan
 - dan juga sebagai promosi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan
 - Diperlukan dukungan kebijakan
 - Dukungan pendanaan yang memadai

22